

**PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75	75,16	0,21
2	Angka Kemiskinan	7,31	7,60	3,81
3	Angka Pengangguran	5,53	3,77	-46,68
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3,11	-1,98	-57,07
5	Pendapatan Per Kapita	123.890.000	130.410.000	4,99
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20,55	-	

Sumber data : BPS Kabupaten Kudus

2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

- 1) Urusan Pendidikan, sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
 - a. Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi dengan capaian 321 unit;
 - b. Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 300 orang;
 - c. Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian tidak ada;
 - d. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD dengan capaian 1.825 orang;
 - e. Jumlah Pendidik pada PAUD dengan capaian 2.792 orang;
 - f. Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak usia Dini, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian 2.115 orang;
 - g. Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang Memiliki Ijazah D- IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidik dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal dari Lembaga Pemerintah yang Berwenang dengan capaian 511 orang;
 - h. Jumlah SD Negeri Terakreditasi dengan capaian 422 unit;
 - i. Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 53.960 orang
 - j. Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian 53.960 orang;
 - k. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 3.566 orang;
 - l. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 4.121 orang;
 - m. Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 844 orang;
 - n. Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dengan capaian 707 orang;

- o. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik dengan capaian 1.820 orang;
- p. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan capaian 285 orang;
- q. Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat dengan capaian 422 orang;
- r. Jumlah SMP terakreditasi dengan capaian dengan capaian 50 unit;
- s. Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 20.727 orang;
- t. Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian 20.727 orang;
- u. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 1.502 orang;
- v. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 1.636 orang;
- w. Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 236 orang;
- x. Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian 302 orang;
- y. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik dengan capaian 802 orang;
- z. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan capaian 38 orang;
- aa. Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat dengan capaian 214 orang;
- bb. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi dengan capaian 9 unit;

- cc. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah dengan capaian 1.467;
 - dd. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan capaian 0;
 - ee. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan dengan capaian 340 orang;
 - ff. Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan dengan capaian 351 orang;
 - gg. Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dengan capaian 322 orang;
 - hh. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan capaian 0 (tidak ada);
 - ii. Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1 dengan capaian 14 orang.
- 2) Urusan Kesehatan, sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten
- a. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai Standar dengan capaian 7 unit;
 - b. Jumlah RS Dibina dan Dipersiapkan Akreditasinya dengan capaian 7 unit;
 - c. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 15.612 meliputi : Ketersediaan alat kesehatan, Pemeriksaan laboratorium, Obat TTD, BHP, Vaksin TD, Buku KIA;
 - d. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Antenatal dengan capaian 3.053 meliputi Dokter : 326, Dokter spesialis 32, Bidan 847, Perawat 1.848;
 - e. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 14.005 meliputi : Ketersediaan alat kesehatan termasuk (anafikantik), Obat (Vit A Merah), BHP, Buku KIA ;
 - f. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Persalinan Sesuai Standar dengan capaian 3.115 meliputi Dokter: 326, Dokter spesialis 32, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62;
 - g. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 13.911 meliputi :

- Ketersediaan alat kesehatan, Pemeriksaan laboratorium, Obat (salf mata, Vit K), Vaksin HBO, BHP, Formulir MTBM formulir , BBL, Buku KIA ;
- h. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Standar dengan capaian Dokter 326, Dokter spesialis, 32, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62;
 - i. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 57.152 meliputi : Ketersediaan alat kesehatan termasuk (anafikatik), Obat (Vit A biru dan merah), Vaksin imunisasi dasar, BHP, Buku KIA;
 - j. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62;
 - k. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 126.004 meliputi : Ketersediaan alat UKS kit, Buku Rapor Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner skrining kesehatan;
 - l. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
 - m. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 262.596 meliputi : Pedoman dan media KIE, Alat ukur TB, Tensi meter, Glukometer, Tes Strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, Aplikasi Sistem Informasi PTM;
 - n. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
 - o. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 61.239 meliputi , Strip uji gula darah, Kolesterol, Instrumen Geriatrik, Instrumen Abbreviated Menta Test, Instrumen Activity Daily Living (paket pengkajian paripurna pasien geriatric, Buku kesehatan lansia;
 - p. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;

- q. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 98.452 meliputi : Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE, Tensimeter, Aplikasi Sistem Informasi PTM;
 - r. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
 - s. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 23.495 meliputi : Glukometer, Strip tes gula darah, Kapas alkohol, lancet;
 - t. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, Nutrisionis 62, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
 - u. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 1.645 meliputi : buku pedoman diagnosis pertolongan gangguan jiwa, kit alat fiksasi, media KIE, formulir pencatatan pelaporan;
 - v. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Perawat 1.848;
 - w. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian jumlah sasaran 10.430 meliputi : Media KIE, Reagen Zn TB, Masker rumah tangga, Masker N95, Pot dahak, kaca slide, BHP, Catridge TCM, SOP;
 - x. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Perawat 1.848, Analis tehnik Laboratorium Medik (ATLM) 121, Tenaga kesehatan masyarakat 13, Radiographer (penata rontgen) 50;
 - y. Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia dengan capaian untuk jumlah sasaran 19.622 meliputi : Media KIE, RDT, BHP;
 - z. Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian Dokter : 326, Bidan 847, Perawat 1.848, ATLM 121, Tenaga kesehatan masyarakat 80;
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 35,25 ha;

- b. Panjang Sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 17.702 m;
- c. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 0 karena Kabupaten Kudus tidak ada pantai;
- d. Panjang Pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 0 karena Tidak ada wilayah pantai;
- e. Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan / Pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
- f. Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian ada (1);
- g. Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kab dengan capaian Tidak ada;
- h. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 35,25 ha;
- i. Panjang Sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian 17.702 m;
- j. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
- k. Panjang Pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
- l. Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan / Pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
- m. Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dengan capaian Tidak ada;
- n. Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kab dengan capaian Tidak ada;
- o. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik dengan capaian 87,9 %;
- p. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik dengan capaian 87,9 %;

- q. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tester dalam Kondisi Baik dengan capaian 87,9 %;
- r. Penetapan Dokumen Rispam Kabupaten dengan capaian ada (1 Dokumen);
- s. Tersusun dan ditetapkannya Jastrada Kab dengan capaian ada (1 dokumen);
- t. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab Penyelenggara SPAM dengan capaian idak ada;
- u. Jumlah Izin yang Diberikan kepada Badan Usaha untuk Melakukan Penyelenggaraan SPAM dengan capaian tidak ada;
- v. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Lain dengan capaian tidak ada;
- w. Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Menggunakan SPALD-S dengan capaian 2.056;
- x. Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Menggunakan SPALD-T dengan capaian 1.356;
- y. Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setemoat dan Data Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Menggunakan SPALD-S dan SPALD- T dengan capaian 3.812;
- z. Jumlah Rumah yang sudah Menerima Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja dengan capaian 34 rumah;
- aa. Jumlah Rumah yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Lumpur Tinja dengan capaian 34 rumah;
- bb. Jumlah Rumah yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Air Limbah Domestik dengan capaian 1.356 rumah;
- cc. Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar dengan capaian 30,57 %;
- dd. Kinerja Penyediaan Pelayanan IPLT Akses Aman dengan capaian 23,66 %;
- ee. Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman dengan capaian 23,66 %;
- ff. Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat dengan capaian 23,66 %;
- gg. Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja dengan capaian 33,33 %;

- hh. Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja dengan capaian 11,53 %;
- ii. Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD dengan capaian 100 %;
- jj. Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja dengan capaian 0,42 %;
- kk. Rasio Bangunan Gedung (kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi dengan capaian 100 %;
- ll. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting Jml kumulatif dengan capaian 12.257 izin;
- mm. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung dengan capaian Ada, Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
- nn. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung dengan capaian Ada, Keputusan Bupati Kudus No. 600/226/2021 tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung ;
- oo. Jumlah Bangunan Gedung yang Ditetapkan oleh Bupati untuk Dilindungi dan Dilestarikan dengan capaian 4;
- pp. Jumlah Bangunan Gedung yang Ditetapkan oleh Bupati Walikota untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten dengan capaian tidak ada;
- qq. Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kab dengan capaian 3.673 unit;
- rr. Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemeritah Kabupaten/ Kota yang dipelihara/ Dirawat dengan capaian 179 unit;
- ss. Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalaan Kewenangan Kab dengan capaian 639.262 m;
- tt. Panjang Jalan yang Dibangun dengan capaian tidak ada;
- uu. Panjang Jembatan yang Dibangun dengan capaian tidak ada;
- vv. Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur/Fungsi) dengan capaian 2.569 m;
- ww. Panjang Jembatan yang Diganti/Dilebarkan dengan capaian 0 m;
- xx. Panjang Jalan yang Direkonstruksi / Direhabilitasi dengan capaian 7.232 m;

- yy. Panjang Jembatan yang Direhabilitasi dengan capaian 0 m;
- zz. Panjang Jalan yang Dipelihara dengan capaian 4.061,5 m;
- aaa. Panjang Jembatan yang Dipelihara dengan capaian tidak ada;
- bbb. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;
- ccc. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten dengan capaian 164 orang;
- ddd. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi Ahli di Wilayah Kabupaten dengan capaian 164 orang;
- eee. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang Aktif dengan Data Termutakhir dengan capaian tidak ada;
- fff. Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/ Kota untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBD Kab dengan capaian tidak ada;
- ggg. Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari APBN dengan capaian tidak ada;
- hhh. Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun Berjalan yang Bersumber dari Pendanaan Lainnya dengan capaian tidak ada;
- iii. Tersedianya Data dan Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Sesuai Kewenangannya yang Sudah dan Sedang Dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Termutakhir Secara Berkala dengan capaian tidak ada;
- jjj. Tersedianya Data dan Profil OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten dengan capaian tidak ada;
- kkk. Tersedianya Data dan Informasi Pelatihan Tenaga Operator dan Teknis/ Analis Konstruksi di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Sendiri atau Melalui Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang Diregistrasi oleh Menteri yang Membidangi Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah Lainnya dengan capaian tidak ada;

- lll. Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknisi/Analisis dengan capaian tidak ada;
- mmm. Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang Tersertifikasi Operator/ Teknisi/ Analisis di Wilayah Kab dengan capaian tidak ada;
- nnn. Tersedianya Data dan Informasi Badan Usaha yang Mendapatkan Pembinaan di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;
- ooo. Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang Disetujui dengan capaian tidak ada;
- ppp. Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pengawasan Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya dengan capaian tidak ada;
- qqq. Tersedianya Data dan Informasi Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya dengan capaian tidak ada;
- rrr. Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pengawasan Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya dengan capaian tidak ada;
- sss. Jumlah Badan Usaha yang Memiliki IUJKN di Wilayah Kab 78 badan usaha;
- ttt. Jumlah Usaha Perseorangan yang Memiliki TDUP di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;
- uuu. Jumlah Badan Usaha yang Memiliki IUJKN yang Terlibat dalam Proyek di Wilayah Kabupaten dengan capaian tidak ada;
- vvv. Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Pembinaan di Wilayah Kab dengan capaian tidak ada;
- www. Jumlah Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui dengan capaian tidak ada;
- xxx. Jumlah Pengawasan Terkait Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan

- Usaha Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tidak ada;
- yyy. Jumlah Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tidak ada;
- zzz. Jumlah Pengawasan Terkait Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tidak ada.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat, sumber data Dinas PKPLH
- a. Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana dan Rencana Penangannya dengan capaian 24.085 unit;
 - b. Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam dengan capaian 5 unit;
 - c. Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban yang Rumahnya Terkena Bencana Alam dengan capaian 14 jiwa,
 - d. Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi Sesuai dengan Rencana Aksi dengan capaian nihil;
 - e. Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Dibangun Kembali Sesuai dengan Rencana Aksi dengan capaian nihil;
 - f. Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Dibangun Baru/ Relokasi Sesuai Dengan Rencana Aksi dengan capaian nihil;
 - g. Jumlah Unit dan Lokasi Rumah Sewa yang Akan Menjadi Tempat Tinggal Sementara Korban Bencana dengan capaian 99 unit;
 - h. Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang Terfasilitasi dengan capaian nihil;
 - i. Jumlah Luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan dengan capaian nihil;
 - j. Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang telah Mendapatkan Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
 - k. Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Belum
-

Mendapatkan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;

1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan Subsidi Uang Sewa Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;

- m. Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Telah Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
- n. Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM dengan capaian nihil;
- o. Jumlah Total Luasan (Ha) Pengadaan Tanah dengan capaian nihil;
- p. Jumlah Luasan (Ha) Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha dengan capaian 8,89 ha;
- q. Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLH dengan capaian 318 unit;
- r. Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh dengan capaian 136,51 ha;
- s. Jumlah Rumah di Kab dengan capaian 246.445 unit;
- t. Jumlah Unit PK RTLH dengan capaian 318 unit;
- u. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan capaian 7.211 unit;
- v. Jumlah Rumah yang Tidak Dihuni dengan capaian 12.322 rumah;
- w. Rasio Rumah dan KK dengan capaian 1,14 %;
- x. Jumlah rumah Pembangunan Baru dengan capaian 123 unit;
- y. Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU dengan capaian 40 perumahan;
- z. Jumlah Unit Rumah yang Sudah Difasilitasi air Minum dengan ca
- aa. Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi Jalan Lingkungan dengan
- bb. Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi Akses Sanitasi (On Site/ Off Site) dengan capaian 100 rumah;
- cc. Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi RTNH dengan capaian 9 perumahan;
- dd. Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi Akses PJU dengan capaian 246.445 rumah;
- ee. Jumlah Pengembang yang Tersertifikasi dengan capaian 20 pengembang;

- ff. Jumlah Pengembang yang Teregistrasi dengan capaian 20 pengembang;
- gg. Jumlah Pengembang yang Mendapat Penyuluhan atau Pelatihan dengan capaian nihil.

- 5) Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sumber data Satpol PP
- a. Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab yang Ditangani dengan capaian 849;
 - b. Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan dengan capaian 1.357 orang;
 - c. Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan dengan capaian 2.595;
 - d. Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS dengan capaian 3 orang;
 - e. Tersedianya SOP Dalam Penegakan Perda dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum dengan capaian Ada (10);
 - f. Tersedianya Sarana Prasarana Minimal dengan capaian Ada (1);
 - g. Persentase Penyelesaian Dokumen KRB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal dengan capaian 0%
 - h. Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana dengan capaian 100%;
 - i. Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai Dinyatakan Sah/Legal dengan capaian 0 %;
 - j. Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon Sampai Dinyatakan Sah/Legal dengan capaian 0 %;
 - k. Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan dengan capaian 0 %;
 - l. Persentase Warga Negara yang Ikut pelatihan dengan capaian 1%;
 - m. Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dengan capaian 30 %;
 - n. Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan dengan capaian 100 %;
 - o. Persentase Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status KLB dengan capaian 0%;
 - p. Persentase Kecapatan Respon Kurang Dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana dengan capaian 0%;
 - q. Persentase Jumlah Petugas yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana dengan capaian 100%;

- r. Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana dengan capaian 100%;
 - s. Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten dengan capaian 1;
 - t. Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan dengan capaian tidak ada;
 - u. Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan dengan capaian tidak ada;
 - v. Pos Damkar yang Dilengkapi Sarana/Prasarana Damkar, Sarana/Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan/Desa dengan capaian tidak ada;
 - w. Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi dengan capaian 3;
 - x. Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran dengan capaian 32;
 - y. Jumlah Relawan Kebakaran di Bawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran 103;
 - z. Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dengan capaian 2 kali.
- 6) Urusan Sosial, sumber data Dinsos P3AP2KB
- a. Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki dengan capaian 4 layanan;
 - b. Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM dengan capaian 2009 orang;
 - c. Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk dengan capaian 1 Tim Razia PGOT;

- d. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dijangkau dengan capaian 1.744 orang;
- e. Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki dengan capaian 1 unit (Mobil Resque);
- f. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Perumahan Sesuai Standar Gizi dengan capaian 413 orang;
- g. Jumlah Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar dengan capaian 1 (satu) unit;
- h. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang dengan capaian 20 orang;
- i. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu dengan capaian 37 orang;
- j. Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter dengan capaian 3 buah terdiri 1 buah kursi roda, 2 buah kruk;
- k. Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia dengan capaian tidak ada;
- l. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan dengan capaian tidak ada;
- m. Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah dengan capaian tidak ada;
- n. Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan dengan capaian 1 orang;
- o. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial dengan capaian 1.744 orang;
- p. Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat dengan capaian 1 bulan 1 kali;

- q. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan dengan capaian 39orang;
- r. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian 44 orang;
- s. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga 9 orang;
- t. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga dengan capaian 9 orang;
- u. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk dengan capaian 49 orang ;
- v. Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Makanan dengan capaian 14.554 orang;
- w. Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang dengan capaian 431 orang;
- x. Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Yang Dimiliki dengan capaian 132 desa/kel;
- y. Jumlah Paket Permakanan Khusus Untuk Kelompok Rentan dengan capaian 230orang;
- z. Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Pelayanan Dukungan Psikososial dengan capaian 4.034 orang;
- aa. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial Yang tersedia dengan capaian 33 orang.

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

- 7) Urusan Tenaga Kerja, sumber data Disnaker Perinkop UKM
 - a. Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota tidak ada;
 - b. Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja dengan capain 99 %;
 - c. Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten/ Kota tidak ada;
 - d. Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster dengan capaian 15 %;

- e. Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 55 %;
- f. Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan dengan capaian 3,46 %;
- g. Persentase LPK Terakreditasi dengan capaian 0 %;
- h. Persentase LPK yang Memiliki Perizinan dengan capaian 51,61 %;
- i. Jumlah Pengangguran Yang Dilatih dengan capaian 828 orang;
- j. Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan dengan capaian 100%;
- k. Persentase Penyerapan Lulusan dengan capaian 52,02%;
- l. Lulusan Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 3,27%;
- m. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Diberikan Pelatihan dengan capaian 0;
- n. Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan capaian 0;
- o. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktifitas dengan capaian 0;
- p. Data Tingkat Produktivitas Total dengan capaian 0;
- q. Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dengan capaian 57,49 %;
- r. Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan capaian 102,78 %;
- s. Rekapitulasi Tahunan Jumlah Konfederasi SP/SB Yang Tercatat, Federasi SP/SB Yang Tercatat, SP/SB di Perusahaan Yang Tercatat dan Anggota SP/SB di Luar Perusahaan Yang Tercatat dan Anggota SP/SB di Perusahaan dengan capaian Konfederasi SP/SB : 1, Federasi SP/SB : 12, Anggota SP/SB diluar perusahaan: 109 org, Anggota SP/SB di perusahaan : 92.415 org;
- t. Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Penuh dengan capaian 91,59 %;
- u. Persentase Perusahaan yang Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan capaian 224,92 %;
- v. Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih dengan capaian 1,03 %;
- w. Jumlah Mogok Kerja dengan capaian 0;
- x. Jumlah Penutupan Perusahaan dengan capaian 0;
- y. Jumlah Perselisihan Kepentingan dengan capaian 0;

- z. Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan dengan capaian 0;
- aa. Jumlah Perselisihan PHK dengan capaian 9 ;
- bb. Jumlah Pekerja/Buruh yang Ter-PHK dengan capaian 11;
- cc. Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite dengan capaian 2;
- dd. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan dengan capaian ada (1);
- ee. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial dengan capaian 40 %;
- ff. Jumlah Lowongan Yang Tersedia di Wil Kab dengan capaian 4.425 loker;
- gg. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kab dengan capaian 7.460 orang;
- hh. Jumlah Bursa Kerja Khusus yang Terdaftar di Wil Kab dengan capaian 22 BKK;
- ii. Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab dengan capaian 0;
- jj. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kab dengan capaian 4 orang;
- kk. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kab dengan capaian 0;
- ll. Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab dengan capaian 4;
- mm. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dengan capaian 3.957 orang;
- nn. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi dengan capaian 0;
- oo. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Terdata dengan capaian 115 orang;
- pp. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan dengan capaian 0;
- qq. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja dengan capaian 0;

- rr. Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna dan Keluarganya dengan capaian 0;
 - ss. Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentukan dengan capaian 0;
- 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber data Dinsos P3AP2KB
- a. Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota Yang Telah Dilatih PUG dengan capaian 61 terdiri 34 OPD dan 27 Desa;
 - b. Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab dengan capaian 24 Program;
 - c. Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjsama Untuk Melakukan “KIE” Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan capaian 2 Media;
 - d. Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM dengan capaian 6 lembaga;
 - e. Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani dengan capaian 1,45%;
 - f. Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan dengan capaian 6 lembaga;
 - g. Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab (APBD Kab) dengan capaian 2 lembaga;
 - h. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kab Yang Mendapat Pelatihan dengan capaian 288 orang;
 - i. Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kab Yang Sudah Dilatih dengan capaian 7 orang;
 - j. Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Pelatihan dengan capaian 1 lembaga (JPPA);
 - k. Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Oleh Pemerintah Kab dengan capaian 2 lembaga (JPPA dan forum Anak);
 - l. Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah Yang Sudah Dievaluasi dengan capaian belum ada;
 - m. Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Hak Perempuan Yang Telah Terstandarisasi dengan capaian 1 lembaga (JPPA);

- n. Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani dengan capaian 100 %.

9) Urusan Pangan, sumber data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Tersedianya Infrastruktur Perundangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpangan Cadangan Pangan dengan capaian Ada (14);
- b. Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan capaian Ada (37.000);
- c. Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal dengan capaian Tidak ada;
- d. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam dan Bergizi Seimbang dengan capaian Ada;
- e. Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan capaian Ada ;
- f. Tertanganinya Kerawanan Pangan dengan capaian Ada (18);
- g. Tersalurkannya Cadangan Pangan Pada Daerah rentan Rawan Pangan dengan capaian Ada (5.260);
- h. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan capaian Ada (13).

10) Urusan Pertanahan

- a. SK Izin Lokasi Yang diterbitkan oleh Bupati dengan capaian 10;
- b. SK Bupati Tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform Yang Bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek dengan capaian tidak ada;
- c. SK Bupati Tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dengan capaian tidak ada;
- d. Dokumen Izin Membuka Tanah dengan capaian
- e. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten dengan capaian tidak ada;

11) Urusan Lingkungan Hidup, sumber data Dinas PKPLH

- a. Hasil Penghitungan terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA) = 47 ndeks Kualitas Udara (IKU)=79,47
Indeks Tutupan Hutan (ITH) = 58,23
- b. Tersedianya Data Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten dengan capaian ada

1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah dengan capaian= 2,74
 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah dengan capaian 69.200 m³;
 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan dengan capaian = 0,03 %
- c. Data Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan capaian 100%;
 - d. Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Terhadap Usaha Yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH Yang diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten dengan capaian 0,01%;
 - e. Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten dengan capaian nihil;
 - f. Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat Hukum Adat Terkait PPLH dengan capaian tidak ada;
 - g. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberikan Diklat dengan capaian 100%;
 - h. Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Iizin PPLH dan PUULH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota Yang Ditangani dengan capaian 100%.
- 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber data Dinas Dukcapil
- a. Penerbitan KTP Elektronik dengan capaian 144,83%;
 - b. Penerbitan Akte Perceraian dengan capaian 200%;
 - c. Penerbitan Akte Kematian dengan capaian 100 %;
 - d. Penyajian Data Kependudukan dengan capaian 300 %.
- 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Jumlah Desa Tertinggal yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa dengan capaian 0, di Kabupaten Kudus tidak ada desa tertinggal;
 - b. Jumlah Desa tertinggal Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Kerjasama Tahun Sebelumnya dengan capaian 0;

- c. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa tertinggal Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan dengan capaian 0;
 - d. Jumlah Peningkatan Desa tertinggal Yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan dengan capaian 0;
 - e. Jumlah Desa Mandiri yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa dengan capaian 104desa;
 - f. Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Kerjasama Tahun Sebelumnya dengan capaian 5 desa;
 - g. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan dengan capaian 5.447;
 - h. Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan dengan capaian 81;.
- 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sumber data Dinas Dinsos P3AP2KB
- a. Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Yang Diperdakan dengan capaian Tidak ada;
 - b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Th dengan capaian 26- 30 tahun;
 - c. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Th ((ASFR) dengan capaian 6,2;
 - d. Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) dengan capaian 100 %;
 - e. Jumlah Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang Berperan Aktif Dalam Program KKBPK dengan capaian 7 lembaga;
 - f. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) Yang Siap Melayani KB MKJP dengan capaian = 87,72 %;
 - g. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan capaian = 15,40%;
 - h. Pemda Yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK Yang Efektif dengan capaian 21 kampung KB;

- i. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan dengan capaian = 46,9 %;
- j. Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah dengan capaian = 44 %;
- k. Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan capaian = 46,35 %;

15) Urusan Perhubungan, sumber data Dinas Perhubungan

- a. Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C dengan capaian 1,3 %;
- b. Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala dengan capaian = 160,17 %;
- c. Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota Dalam Kabupaten, Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi dengan capaian = 3.292;
- d. Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota dengan capaian = 30,85 %.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan capaian = 100%;
- b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo dengan capaian = 100%;
- c. Tersedianya Sistem elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data Dan Sinyal Lainnya) Dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah ya dengan capaian tersedia;
- d. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 dengan capaian 11,03 %;
- e. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar dengan capaian 70,59 %;

- f. Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan dengan capaian 100%;
- g. Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik dengan capaian = 45,63 %;
- h. Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik dengan capaian =7,44 %;
- i. Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian = 25,20 %;
- j. Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan capaian = 40,94 %;
- k. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah dengan capaian 100 %;
- l. Persentase Perangkat Daerah yang Menyimpan Data di Pusat Data Pemerintah dengan capaian 100 %;
- m. Persentase Perangkat Daerah yang Memperbaharui Datanya Sesuai Siklus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo) dengan capaian = 35,29 %
- n. Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai dengan capaian= 38,10 %
- o. Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung Smart City dengan capaian = 73,53 %
- p. Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo dengan capaian 100 %;
- q. Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-government dengan capaian ada;
- r. Persentase Komunitas Masyarakat/ Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dengan capaian = 100 %;

- s. Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dengan capaian = 100 %;
 - t. Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Telah Ditetapkan dengan capaian = 100 %;
- 17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
- a. Persentase Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 21,25 %;
 - b. Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 100 %;
 - c. Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 85,79 %;
 - d. Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0 %;
 - e. Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 16,42 %;
 - f. Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0,08 %;
 - g. Persentase Koperasi yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkopersian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0,55 %;
 - h. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan dengan capaian 0;
 - i. Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 3,69 %;

- j. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 5,54 %;
 - k. Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 0;
 - l. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten dengan capaian 85,79 %;
 - m. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan untuk Koperasi dengan capaian 16,42 %;
 - n. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro dengan capaian = 7,89 %;
 - o. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput ke Dalam Sistem Online Data System (ODS) dengan capaian 7,82 %;
 - p. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra dengan capaian 1,10 %;
 - q. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha dengan capaian 0,26 %;
 - r. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan dengan capaian 1,64%;
 - s. Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan dengan capaian 3,24 %;
 - t. Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan dengan capaian 0,85 %.
- 18) Urusan Penanaman Modal, sumber data Dinas PMPTSP
- a. Perda Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dengan capaian 1 dokumen;
 - b. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;

- c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;
 - d. Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting dengan capaian tidak ada;
 - e. Kegiatan Pameran Penanaman Modal dengan capaian tidak ada karena adanya Covid 19 tidak ada pameran;
 - f. Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;
 - g. Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan capaian 3.034 perusahaan;
 - h. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan capaian 7.510 SK;
 - i. Laporan Realisasi Penanaman Modal dengan capaian 15.187 perusahaan Rp. 39.435.020.784.614;
 - j. Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten dengan capaian ASN 30 org;
 - k. Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN dengan capaian 360 orang;
 - l. Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten dengan capaian 4 kali.
- 19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, sumber data Disdikpora
- a. Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan dengan capaian 50 orang;
 - b. Jumlah Pemuda yang Mendapat Bantuan Kewirausahaan dengan capaian tidak ada;
 - c. Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda dengan capaian 200 orang;
 - d. Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang Mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan dengan capaian tidak ada ;
 - e. Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di Satuan-Satuan Pendidikan dengan capaian 121 orang;
 - f. Jumlah Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah dengan capaian 10 event.
- 20) Urusan Statistik, sumber data Dinas Kominfo
- a. Tersedianya Buku Profil Daerah dengan capaian ada;

- b. Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilakukan dengan capaian 7 survey;
- c. Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang dilakukan dengan capaian 9 survey;
- d. Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS dengan capaian 7 survey;
- e. Jumlah Kompilasi Stastik Sektoral yang Mendapat rekomendasi dari BPS 9 survey
- f. Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik dengan capaian 44,12 %;
- g. Persentase Kelengkapan Metadata Variabel dari Kegiatan Statistik dengan capaian 29,84 %.

21) Urusan Persandian, sumber data Dinas Kominfo

- a. Persentase Kegiatan Strategis yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis yang Harus Diamankan dengan capaian 0 %;
- b. Persentase System Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik yang Ada pada Pemerintah Daerah dengan capaian = 43,31 %;
- c. Persentase System Elektronik/ Asset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah dengan capaian 2,36 %;
- d. Persentase Titik yang Diamankan Dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Ditetapkan dengan capaian = 70,59 %.

22) Urusan Kebudayaan, sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan, Penyelematan dan Publikasi) dengan capaian 114 obyek;
- b. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian, Penayaan Keberagaman) dengan capaian 43 obyek;
- c. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) dengan capaian 92 obyek;

- d. Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, Serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola) dengan capaian 9 Orang;
- e. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan dengan capaian 295 cagar budaya;
- f. Perlindungan cagar budaya kabupaten/ kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) dengan capaian 138 cagar budaya;
- g. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data tidak ada;-
- h. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) dengan capaian 2 cagar budaya;
- i. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) dengan capaian 2 cagar budaya;
- j. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum dengan capaian 213 koleksi;
- k. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum 40.288 orang;
- l. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum;
- m. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya dengan capaian 1 Tim;
- n. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi dengan capaian 1 Tim;
- o. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya tidak ada;
- p. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman dengan capaian 43 orang
- q. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman 2 orang;
- r. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 6 unit;
- s. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dengan capaian 9 Kegiatan.

23) Urusan Perpustakaan, sumber data Dinas Arpus

- a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk dengan capaian = 185.05 %;

- b. Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dengan capaian = 14,15 %;
- c. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk dengan capaian = 0,06 %;
- d. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan capaian = 5,66 %;
- e. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat dengan capaian 160 kali;
- f. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya dengan capaian 1 naskah kuno;
- g. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa dengan capaian tidak ada;
- h. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) dengan capaian 116 buku.

24) Urusan Kearsipan, sumber data Dinas Arpus

- a. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan capaian = 100 %;
- b. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan capaian = 100 %;
- c. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 19,33 %;
- d. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dengan capaian = 4,96 %;
- e. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK tidak ada;
- f. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 1 buku;
- g. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi tidak ada;
- h. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK dengan capaian tidak ada;
- i. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK tidak ada;
- j. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK -

Urusan Pilihan

- 1) Urusan Kelautan dan Perikanan, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
 - a. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) dengan capaian 560 org;
 - b. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional dengan capaian 0 (tidak ada pelelangan ikan);
 - c. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan dengan capaian 0 (tidak ada IUP);
 - d. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) dengan capaian 155 pembudidaya;
 - e. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi dengan capaian 116.800.000 ekor.
- 2) Urusan Pariwisata, sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Jumlah entitas pengelolaan destinasi dengan capaian 48;
 - b. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dengan capaian 591;
 - c. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten dengan capaian 15 TDUP;
 - d. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan capaian 0 karena adanya pandemi Covid-19;
 - e. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri dengan capaian 3 kegiatan;
 - f. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten dengan capaian 0 industri; pandemi covid-19 dan refocusing anggaran;
 - g. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri dengan capaian 2 industri;
 - h. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi dengan capaian = 5,72 %;
 - i. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dengan capaian = 25 %;
 - j. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat dengan capaian 11 lokasi.

- 3) Urusan Pertanian, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
 - a. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan:
 - Irigasi tersier: 17 unit
 - Irigasi perpompaan: 3 unit
 - Irigasi air tanah dangkal : 2 unit
 - Jalan usaha tani : 16 paket
 - Jaringan irigasi Tk Usaha Tani : 2 paket
 - Embung ; 1 paket
 - b. Prasaran pertanian yang digunakan dengan capaian 41 unit;
 - c. Penerbitan izin usaha pertanian 52 dokumen; -
 - d. Persentase prasarana yang digunakan dengan capaian 100%;
 - e. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota dengan capaian 94,55 %;
 - f. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana dengan capaian 100%.

- 4) Urusan Kehutanan, sumber data Dinas PKPLH
 - a. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura dengan capaian belum ada;
 - b. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga dengan capaian 11 kelompok;
 - c. Pemulihan ekosistem pada Tahura dengan capaian 2,5ha;
 - d. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA dengan capaian nihil.

- 5) Urusan ESDM, sumber data Dinas
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota

- 6) Urusan Perdagangan, sumber data Dinas Perdagangan
 - a. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan = 68,99% Toko swalayan = 0
Presentase penerbitan TDG = 100%
 - b. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG dengan capaian 93 %;
 - c. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 0% untuk :
Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri

Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri

- d. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan Bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota = 0%;
 - e. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu = 0% ;
 - f. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya dengan capaian = 100%;
 - g. Persentase koefisien variasi harga antar waktu = 87%
 - h. Jumlah penanganan pengaduan konsumen
 - i. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi
 - j. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di kota dengan capaian jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan dengan capaian 86,67
 - k. Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan = 72,88 %
 - l. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku = 100%
- 7) Urusan Perindustrian, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
- a. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten dengan capaian 0%;
 - b. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA dengan capaian = 0 %;
 - c. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan dengan capaian = 0%;
 - d. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan dengan capaian = 0%;
 - e. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten dengan capaian = 2%.

- 8) Urusan Transmigrasi, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
- a. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya dengan capaian 0;
 - b. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dengan capaian 0;
 - c. Jumlah satuan pemukiman yang dibina dengan capaian 0.

2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

1) Urusan Pendidikan, sumber data Disdikpora

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian 83,89%;
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan capaian = 99,29 %;
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian = 82,07 %;
- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian = 10,83 %.

2) Urusan Kesehatan, sumber data Dinas Kesehatan

- a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan dengan capaian = 0,14 %;
- b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi dengan capaian = 100%;
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian = 94,86 %;
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian = 100 %;
- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian = 98,63 %;
- f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian = 82,90 %;
- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian = 79,52 %;
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;

- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;
 - j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;
 - k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian = 100 %;
 - l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian = 100 %;
 - m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan capaian = 40,81 %;
 - n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai dengan capaian = 100 %.
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Dinas PKPLH
- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab dengan capaian = 100 %;
 - b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab dengan capaian 0 (tidak ada wilayah pantai);
 - c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan capaian = 87,90 %;
 - d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dengan capaian = 97,99 %;
 - e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik = 100%;
 - f. Rasio kepatuhan IMB kab dengan capaian = 100%;
 - g. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten dengan capaian = 92,34 %;
 - h. Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian = 47,40 %;

- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian = 100%.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat, sumber data Dinas PKPLH
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan capaian nihil;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program dengan capaian nihil;
 - c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dengan capaian 93,89%;
 - d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 2,93 %;
 - e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 100 %.
 - 5) Urusan Trantibumlinmas, sumber data Satpol PP,
BPBD
 - a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian = 89,94 %;
 - b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian = 98,21 %;
 - c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan capaian 136.828 orang;
 - d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 136.828 Orang;
 - e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 156.432 orang;
 - f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian = 100%;
 - g. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan capaian 13,304 menit.
 - 6) Urusan Sosial, sumber data Dinsos P3AP2KB
 - a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) dengan capaian = 86,81 %;

- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dengan capaian = 100 %.
- 7) Urusan Tenaga Kerja, sumber data Disnakerperinkop
UKM
- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan capaian 2,61 %;
 - b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan capaian = 70,83 %;
 - c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja capaian 0;
 - d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan capaian = 73,12 %;
 - e. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten dengan capaian = 53,04 %.
- 8) Urusan Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber data Dinsos P3AP2KB
- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan capaian = 27,88 %;
 - b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten dengan capaian = 0,007%;
 - c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan capaian = 3,154.
- 9) Urusan Pangan, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) dengan capaian = 188,66 %
- 10) Urusan Pertanahan
- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dengan capaian 100%;
 - b. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum dengan capaian tidak ada;

- c. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal dengan capaian tidak ada;
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan capaian tidak ada;
- e. Tersedianya tanah untuk masyarakat dengan capaian tidak ada;
- f. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan capaian = 100%.

11) Urusan Lingkungan Hidup, sumber data Dinas PKPLH

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten dengan capaian IKLH = 62,6 ;
- b. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab dengan capaian 77,001 %;
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab dengan capaian 1,875 %.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber data Dinas Dukcapil

- a. Perekaman KTP Elektronik dengan capaian= 98,69%;
- b. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan capaian = 60,55 %;
- c. Kepemilikan akta kelahiran dengan capaian = 98,16%;
- d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan capaian = 42,86%.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal dengan capaian 0, tidak ada desa tertinggal;
- b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri dengan capaian = 29,82%.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, sumber data Dinas Sosial P3AP2KB

- a. TFR (Angka Kelahiran Total) dengan capaian 2,12;

- b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan capaian = 72,63 %;
 - c. Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 13,89 %.
- 15) Urusan Perhubungan, sumber data Dinas Perhubungan
- a. Rasio konektivitas Kabupaten dengan capaian Nilai bobot = 2,17;
 - b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten dengan capaian 0,66.
- 16) Urusan Komunikasi dan Informatika, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian = 100 %;
 - b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 16,83%;
 - c. persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten dengan capaian = 72,37 %.
- 17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
- a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan capaian = 15,68 %;
 - b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha= dengan capaian 100%.
- 18) Urusan Penanaman Modal, sumber data Dinas PMPTSP
- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten dengan capaian = -27,779.
- 19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, sumber data Disdikpora
- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian = 0,025 %;
 - b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dengan capaian = 73,18 %;
 - c. Peningkatan Prestasi Olahraga dengan capaian 15 medali.

- 20) Urusan Statistik, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100 %;
 - b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100 %.
- 21) Urusan Persandian, sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan capaian 26,36 %.
- 22) Urusan Kebudayaan, sumber data Dinas Budpar Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian 35,57%.
- 23) Urusan Perpustakaan, sumber data Dinas Arpus
- a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan capaian = 14,15 %;
 - b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = 0,057
UPLM 2 = 182,05
UPLM 3 = 0,057
UPLM 4 = 14,15
UPLM 5 = 5,656
UPLM 6 = 0,267
UPLM 7 = 2,27
Indek Pembangunan Literasi Masyarakat = 34,09
- 24) Urusan Kearsipan, sumber data Dinas Arpus
- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan capaian = 56,07 %;
 - b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah han, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian = 0%.

Urusan pilihan

- 1) Urusan Kelautan dan Perikanan, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) dengan capaian 2.702,71 ton.
- 2) Urusan Pariwisata, sumber data Dinas Budpar
 - a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan capaian = 0 % karena adanya pandemi covid-19;
 - b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten dengan capaian = 7,49 %;
 - c. Tingkat Hunian Akomodasi dengan capaian = 6,62%;
 - d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku dengan capaian = 0,55 %;
 - e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dengan capaian 0,27 %.
- 3) Urusan Pertanian, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
 - a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan capaian = 666,437 ton/ha;
 - b. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dengan capaian 0, Tidak ada kasus.
- 4) Urusan Kehutanan
- 5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sumber data Dinas Pertanian dan Pangan
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota
- 6) Urusan Perdagangan, sumber data Dinas Perdagangan
 - a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS/SIUP Toko Swalayan) dengan capaian 68,98 %;
 - b. Persentase kinerja realisasi pupuk = 86,67 %
 - c. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan capaian = 72,88 %.

- 7) Urusan Perindustrian, sumber data Dinas Nakerperinkop UKM
- a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten dengan capaian = - 99,67 %;
 - b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan capaian 100 %;
 - c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan capaian = 100 %;
 - d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IP UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0%;
 - e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten dengan capaian = 0%;
 - f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan capaian 75%.

2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan), sumber data BPPKAD, Inspektorat
 - a. Rasio Belanja Pegawai Kesehatan di Luar Guru dan Tenaga dengan capaian = 12, 23 %;
 - b. Rasio PAD dengan capaian = 0,46 %;
 - c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)= Level 2;
 - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) = Level 3;
 - e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) dengan capaian = 14,43 %;
 - f. Opini Laporan Keuangan = WTP.
- 2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan), sumber data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama dengan capaian = 0 %

- b. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif dengan capaian = 48,06 %;
 - c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan capaian = 89,58 %;
- 3) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian), sumber data BKPP
- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan dengan capaian = 61,18 %;
 - b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 4,09%;
 - c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian = 100%.
- 4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan), sumber data BPPKAD
- a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan capaian = 17,47;
 - b. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dengan capaian = 86,19 %;
 - 1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya
 - 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya
 - 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya
 - 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya
 - c. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya dengan capaian = 28,84 %.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 1.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Harapan Lama Sekolah	14,44
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%
4.	Angka Harapan Hidup	76,51
5.	Angka Kematian Ibu	59,27
6.	Angka Kematian Bayi	7,30
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.130,49
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	75,00
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56
13.	Indeks Rasa Aman	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%
15.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	134
16.	Angka Kemiskinan	6,21
17.	Angka Pengangguran	3,15
18.	Nilai Investasi	8,34
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	81,72%
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Harapan lama sekolah	14,44	13,24	91,69
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70	8,76	100,69
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%	86,13%	98,39
4.	Angka Harapan Hidup	76,51	76,78	100,35
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	150,95	-54,68
6.	Angka Kematian Bayi	7,30	6,75	107,53
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.130,49	11.272,00	101,27
8	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00	dalam proses	-
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,00	dalam proses	-
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	dalam proses	-
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	86,88	104,67
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,44	83,02
14.	Indeks Toleransi	100	91,67	91,67
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	134	126,65	94,74
16.	Angka Kemiskinan	6,21	7,60	81,71
17.	Angka Pengangguran	3,15	3,77	80,32
18.	Nilai Investasi	8,34	39,44 T	472,90
18..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	81,72	83,60	102,30
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34	62,76	96,05

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun dalam sebelumnya

Tabel 1.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun					
		2020			2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Harapan lama sekolah	14,20	13,23	93,17	14,44	13,24	91,69
2.	Rata-rata lama sekolah	8,50	8,75	102,94	8,70	8,76	100,69
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,31%	90,63%	103,80	87,54%	86,13%	98,39
4.	Angka Harapan Hidup	76,49	76,60	100,14	76,51	76,78	100,35
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	101,57	28,67	59,27	150,95	-54,68
6.	Angka Kematian Bayi	7,50	8,26	89,86	7,30	6,75	107,53
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	10.989,14	11.160.00	101,55	11.130,49	11.272,00	101,27
8..	Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	67,26	90,89	79,00	Dalam proses	-
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72,50	68,93	95,08	75,00	Dalam proses	-
10,	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTB	WTP	WTP	Dalam proses	-
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	86,81	105,87	83,00	86,88	104,67
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,35	3,08	131,06	2,56	2,53	98,83
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,55	103,77	0,53	0,44	83,02
14.	Indeks Toleransi	100 %	91,67%	91,67	100	91,67	91,67
15..	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	128,03	123,89	96,77	134	126,65	94,51
16.	Angka Kemiskinan	6,45	7,31	86,67	6,21	7,60	81,71
17.	Angka Pengangguran	3,25	5,53	29,84	3,15	3,77	80,32
18.	Nilai Investasi	7,74 T	3,26 T	42,12	8,34 T	39,44 T	472,90
19..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	80,72%	83,19%	103,06	81,72	83,60	102,30
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,13	64,67	100,84	65,34	62,76	96,05

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam
Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 1.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Pembangunan
Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021			Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
		7	8	9	10	10
1.	Harapan lama sekolah	14,44	13,24	91,69	14,90	88,86
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70	8,76	100,69	9,20	95,22
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%	86,13%	98,39	88,00%	97,88
4.	Angka Harapan Hidup	76,51	76,78	100,35	76,54	100,31
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	150,95	-54,68	52,78	-85,99
6.	Angka Kematian Bayi	7,30	6,75	107,53	6,9	102,17
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per Kapita	11.130,49	11.272,00	101,27	11.413,19	98,76
8..	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00	Dalam proses	-	90	Dalam proses
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,00	Dalam proses	-	83	Dalam proses
10,	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Dalam proses	-	WTP	Dalam proses
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	86,88	104,67	85	102,21
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83	2,87	89,40
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,44	83,02	0,53	83,02
14.	Indeks Toleransi	100	91,67	91,67	100 %	91,67
15..	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	134	126,95	94,51	144,87	90,02
16.	Angka Kemiskinan	6,21	7,60	81,71	5,90	77,63
17.	Angka Pengangguran	3,15	3,77	80,32	2,90	70
18	Nilai Investasi	8,34 T	39,44 T	472,90	9,19 T	429,16
19..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	81,72	83,60	102,30	83,73%	99,84
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34	62,76	96,05	67,77	92,61

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Harapan lama sekolah	94,63	14,20	13,23	93,17	14,44	13,24	91,69	14,90	88,86
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	8,50	8,75	102,94	8,70	8,76	100,69	9,20	95,22
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	87,31%	90,63%	103,80	87,54%	86,13%	98,39	88,00%	97,88
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	98,90			99,97			96,92		93,99

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 96,92%. Angka tersebut kurang sebesar 3,05% dari capaian kinerja rata-

rata sasaran tahun 2020 sebesar 99,97%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 2,93% dari 93,99%

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 91,69%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,48% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 93,17%, Realisasi Tahun 2021 sebesar 13,24 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 13,23 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 2,83% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 88,86%.

Meningkatnya dari Target Tahun 2021 sebesar 13,23 dengan realisasi sebesar 13,24 menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,24 tahun atau setara dengan D-2 Faktor yang mendukung realisasi ini adalah tersediaan lembaga pendidikan hingga kepedesaan meningkat sehingga akses masyarakat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2021 mengalami penurunan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya pandemi yang belum berakhir sampai saat ini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,23 dibandingkan 12,77, maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

Peningkatan realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat

mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan. Namun demikian capaian realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami penurunan. Angka capaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 sebesar 100,69%. Angka tersebut kurang sebesar 2,25% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 102,94%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 8,76% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 8,75% mengalami kenaikan sebesar 0,01% dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 5,47% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,22%.

- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 8,76 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP. Meningkatkan dari target yaitu 8,70 dengan realisasi sebesar 8,76. Faktor yang mempengaruhi angka ini adalah partisipasi sekolah dimana tingkat atau fokus tertinggi yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat juga ijazah dari jenjang dari jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat.

Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (7,69)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Efektifitas tersebut karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara optimal sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

- c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2021 sebesar 98,39%. Angka tersebut turun sebesar 5,41% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 103,80%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 86,13% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 90,63% mengalami penurunan sebesar 4,5% dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,51% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 97,88%. Persentase Akses dari Mutu
- Dari Target tahun lalu 2021 sebesar 87,54, Realisasi sebesar 86,13. Realisasi tersebut dipengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Presentase Sekolah atau lembaga terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan masyarakat.

Faktor yang mendukung APM adalah kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD hingga SMP Meningkatkan.

- Angka Kelulusan adalah kelulusan tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan oleh sekolah sehingga sekolah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk meluluskan siswa meski tetap berpedoman pada ketentuan nasional.
- Sekolah Atau Lembaga yang terakreditasi yang meningkat dipengaruhi jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat. Program yang mendukung realisasi Presentase Akses dan Mutu adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

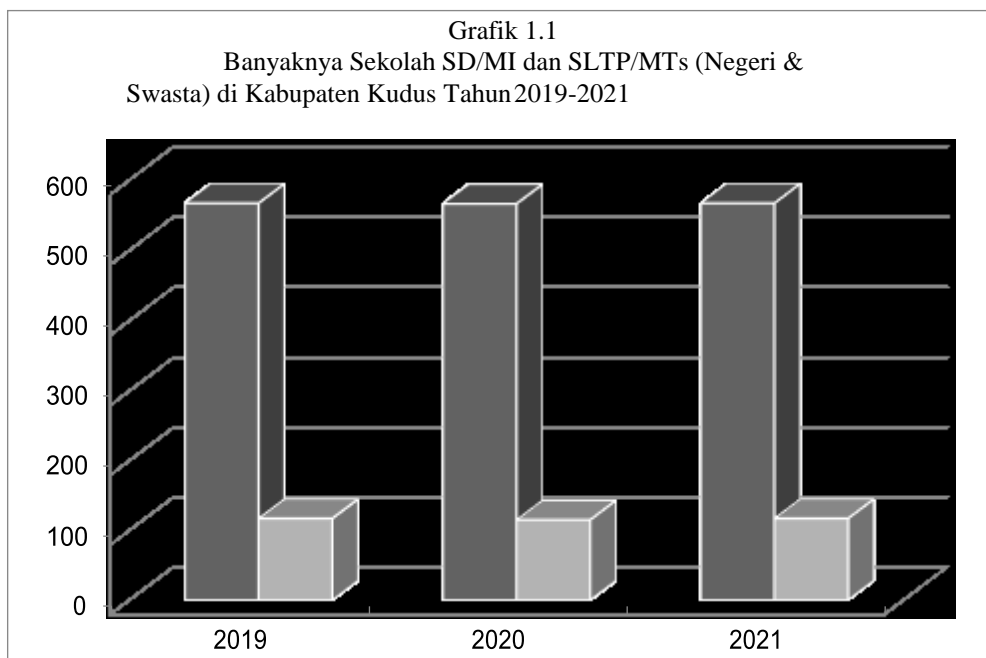
Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
4. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan Penurunan target tersebut disebabkan karena faktor :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar.
- b. Akreditasi jenjang PAUD.
- c. Pendidikan Masyarakat perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan.

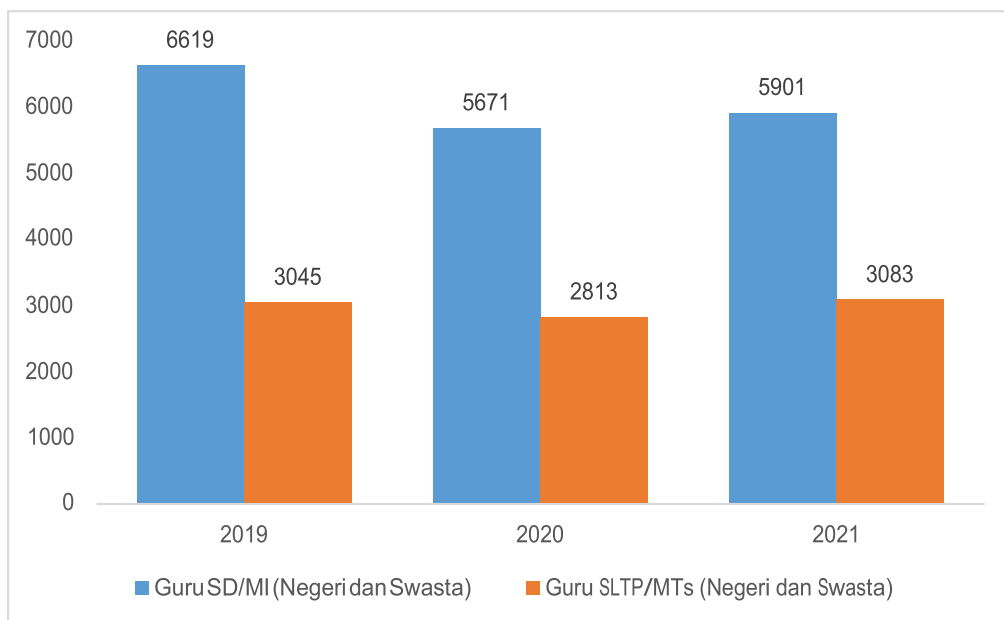
Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 96,92% atau **Sangat tinggi**.

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus :



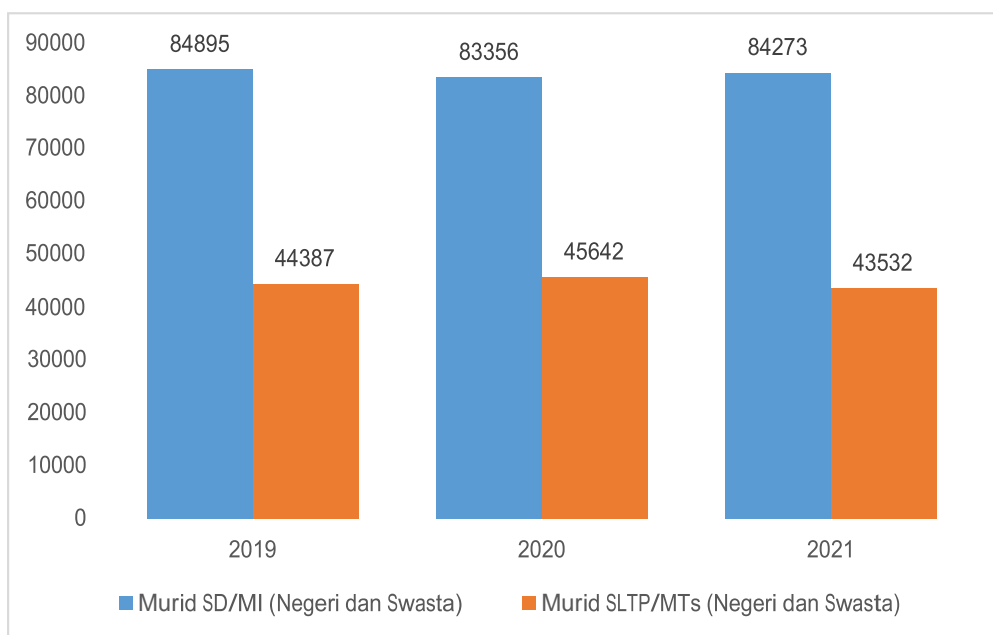
Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Grafik 1.2
 Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Grafik 1.3
 Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs (Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2020 – 2021 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2020/2021 jumlah murid yang bersekolah

mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami penurunan jumlah murid sebesar 0,98%.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2020/2021, tersedia jumlah SD sebanyak 423 unit dan MI sebanyak 144 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 48 dan 69 unit.

Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2020/2021 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), AKBID Mardi Rahayu, AKBID Pemda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2021

1. Prestasi Tingkat Internasional
 1. Certificate of Achievement Global Edu Leader Award 2021 atas nama Dr. Eni Kuswati, S.Pd, M.Pd Pengawas SMP Kabupaten Kudus.
 2. Certificate of Ambassadorship dari Aberdeen United Kingdom tahun 2021 atas nama Dr. Eni Kuswati, S.Pd, M.Pd Pengawas SMP Kabupaten Kudus

2. Prestasi Tingkat Nasional
 1. Piagam Penghargaan untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus atas Partisipasi Aktif dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Tahap 2 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI.
 2. Medali Perak pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SD Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun an Lionel Wijaya siswa SD Cahaya Nur Kudus.
 3. Medali Perunggu pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SD Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Jupiter Arshavina Raditya Mustofa siswa SD Muhammadiyah Birrulwalidain Kudus.
 4. Medali Perunggu pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SMP Tingkat Nasional Bidang Lomba Matematika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Viveca Gracia siswa SMP Masehi Kudus.

5. Medali Emas pada Kompetisi Sains Nasional Jenjang SMP Tingkat Nasional Bidang Lomba IPS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Siti Zumrotul siswa MTS Banat Kudus.
6. Juara II Lomba Kreasi Logo Kesetaraan Berkualitas dan Bermartabat (Desain) pada Festival Pendidikan Kesetaraan pendukung Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 atas nama Arif Rohman tutor PKBM Omah Dongeng Marwah
7. Finalis Kategori Pengelola KB/TPA/SPS Inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Hilfa Millati Azka, S.Pd pendidik pada TPA Aisyiyah Darussalam
8. Finalis Kategori Pengelola KB/TPA/SPS Inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 an Siti Rohmatun, S.H. I pendidik pada POS PAUD Sido Makmur
9. Medali Emas Angkat Berat kelas 61 kg Peparas 2021 an Rani Puji Astuti
10. Medali Perak Bulu Tangkis Ganda Campuran PON Papua 2021 an Indah Cahya Sari Jamil dan Bagas Maulana
11. Medali Perak Tarung Derajat Kelas 45,1Kg-50 Kg Putri PON Papua Tahun 2021 an Vinka Widyaningrum
12. Medali Perak Gulat Gaya Bebas sd 125 kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Ahmad Umar Maulana
13. Medali Perunggu Pencak Silat Kelas G >75s/d 80 kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Annas Rais Arni Rayhan
14. Medali Perunggu Hoki Indoor Beregu Putri PON Papua Tahun 2021 an Resthu Ariandini
15. Medali Perunggu Voli Putra Beregu PON Papua Tahun 2021 an Roisul Umam
16. Medali Perunggu Tarung Derajat Kelas Seni Gharang Putra PON Papua Tahun 2021 an M. Ari Susendra
17. Medali Perunggu Tarung derajat Kelas 55,1Kg-58 Kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Fatah Abdul Majid
18. Medali Perunggu Wushu Sanda Kelas 65 kg Putra PON Papua Tahun 2021 an Ahmad Adam H
19. Medali Perunggu Bulutangkis Beregu Putra PON Papua Tahun 2021 an Bagas Maulana
20. Medali Perunggu Bulutangkis Beregu Putra PON Papua Tahun 2021 an Bagas Kristanto N
21. Medali Perunggu Bulutangkis beregu Putra PON PAPUA Tahun 2021 an Bobby Setiabudi

22. Medali Perunggu Bulu Tangkis Tunggal Putra PON Papua Tahun 2021 an Bobby Setiabudi
23. Medali Emas pada cabang olahraga Petanque Single Woman pada Kejurnas Tahun 2021 atas nama Soimah
24. Juara 1 kejurnas diesnatalis UNESA ke 57 cabor Petanque double mix atas nama Soimah

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Angka Harapan Hidup	100,03	76,49	76,60	100,14	76,51	76,78	100,35	76,54	100,31
2.	Angka Kematian Ibu	89	59,27	101,57	28,67	59,27	150,95	-54,68	52,78	-85,99
3.	Angka Kematian Bayi	95	7,50	8,26	89,86	7,30	6,75	107,53	6,9	102,17
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,68			72,89			51,07		38,83

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 51,07%. Angka tersebut kurang sebesar 21,82% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 72,89%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 12.24% dari 38,83%

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2021 sebesar 100,31%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 0,04% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100,14%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 76,78 tahun dipengaruhi oleh :

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 91,18 %
2. Cakupan pelayanan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 91,54%
3. Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan capaian kinerja 79,96%

apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 76,60 telah melampaui sebesar 0,08 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,04% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100,18%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2021 adalah :

1. Pembentukan satgas covid 19
2. Penerapan prokes dalam semua aspek
3. Penerapan PHBS dalam Perilaku
4. Penguatan germas di lingkungan keluarga
5. Penguatan kegiatan testing, tracing, dan treatment
6. Optimalisasi Vaksin, logistik
7. Peningkatan kapasitas petugas (SDM).

Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

- 1) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.

- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/ Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
 - 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2021 sebesar -54,68 %. Angka tersebut kurang sebesar -83,35% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 28,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 150,95 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 101,57 mengalami kenaikan sebesar 49,38, kenaikan tersebut mempunyai arti tidak baik karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi dan angka tersebut juga telah penurunan sebesar 31,31% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar -85,99%.

Permasalahan/penyebab kegagalan pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2021 karena kematian terbanyak penyebabnya terkonfirmasi covid 19 yaitu 17 kasus (80,95%) dan 4 kasus (19,04%) karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu Pre eklamsia, eklamsia, penyakit jantung bawaan dan TBC.

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar.

Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2021 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak,

dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia, SLE, hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemi covid-19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood pilar yaitu penguatan “Keluarga Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

- 1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
- 2) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
- 4) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber

daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapaian target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2021 penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi covid 19 sebanyak 17 kasus yaitu 80,95%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 19,05 % karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu pre eklamsi , ekamsi, penyakit jantung bawaan dan TBC.

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Satgas Covid 19.
 2. Penguatan puskesmas dan jaringannya
 3. Penguatan manajemen program
 4. Peningkatan peran serta masyarakat
 5. Penguatan kerjasama dan kemitraan
 6. Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara Optimalisasi aplikasi Si BULAN dalam rangka percepatan system
 7. Audit Kematian Ibu
 8. Edukasi tentang 5 M, *screening covid* pada ibu hamil dengan rapid antigen
- c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Bayi tahun 2021 sebesar 107,53%. Angka tersebut kurang sebesar 17,67 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 89,86%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kematian bayi di Kabupaten Kudus sejumlah 94 bayi dari total kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13.911 bayi x 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi Tahun 2021 sebesar 6,75 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 8,26 mengalami penurunan sebesar 1,51 penurunan tersebut mempunyai arti baik karena hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan dan angka

tersebut juga telah melampaui sebesar 5,36% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 102,17%.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi sebanyak 94 kasus :

1. Asfiksia sebanyak 20% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 26% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 11% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.
4. Terkonfirmasi covid 19 dan lainnya sebanyak 43%

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.

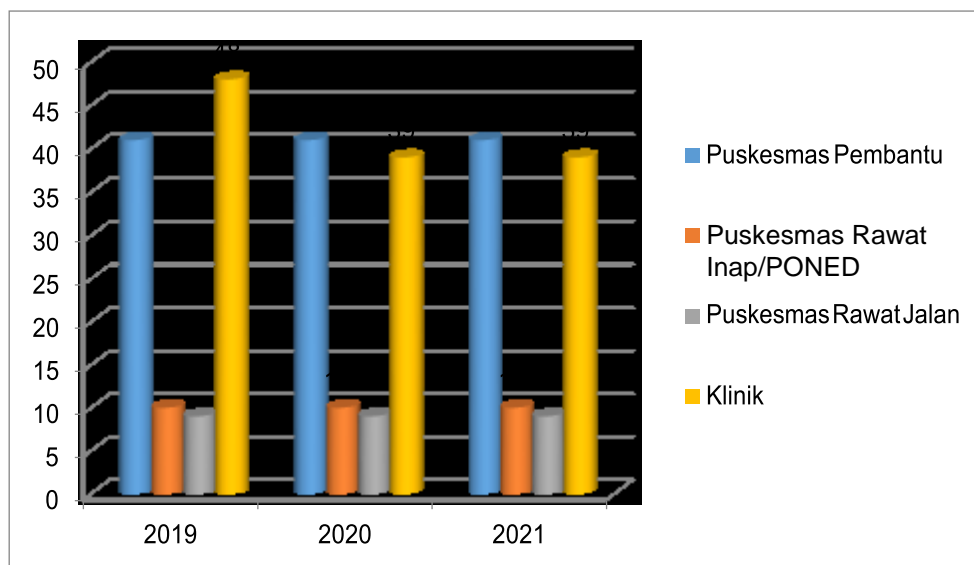
Keberhasilan menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 dilaksanakan melalui :

1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 51,07% atau **Rendah.**

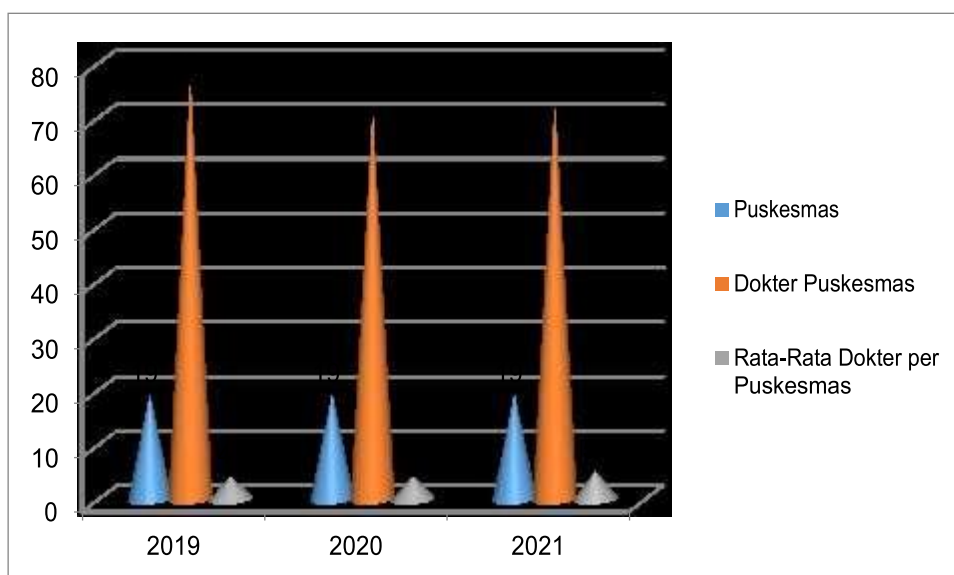
Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Grafik 1.4
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : DKK Tahun 2021

Grafik 1.5
Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : DKK Tahun 2021

Pada tahun 2021 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna.

3. Meningkatkan Kemampuan Konsumsi Masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.7
Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarakat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020			2021				
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	10.989,14	11.160,00	101,55	11.130,49	11.272,00	101,27	11.413,19	98,76
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,33			101,56			101,27		98,76

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 101,27%.

Angka tersebut kurang sebesar 0,29% dari capaian kinerja

sasaran tahun 2020 sebesar 101,56%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 2,51%. dari 98,76%.

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2021 sebesar 101,27%. Angka tersebut kurang sebesar 0,29% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,56%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 11.272,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 11.160,00 mengalami kenaikan sebesar 112,00 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 2,51% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 98,76%.

Realisasi sebesar 101,27 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarakat Masih diterapkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat akibat pandemic covid19 pada tahun 2021, kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat per kapita justru terjadi peningkatan. Salah satu factor yang mempengaruhi adalah, dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, maka keinginan untuk melakukan aktivitas konsumtif dalam rumah justru semakin meningkat, apalagi didukung dengan semakin mudahnya layanan belanja via online.

Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini adalah, sebagai berikut :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2021 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena faktor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 101,27 % atau **Sangat Tinggi**

4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	74,00	67,26	90,89	79,00	Masih dalam proses	-	90	Masih dalam proses
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	72,50	68,93	95,08	75,00	Masih dalam proses	-	83	Masih dalam proses
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTB	WTP	WTP	Masih dalam proses	-	WTP	Masih dalam proses
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	82,00	86,81	105,87	83,00	86,88	104,67	85	102,21
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	2,35	3,08	131,06	2,56	2,53	98,83	2,87	89,40
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	102,32			104,58			101,75		95,81

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2021 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 101,75%. Angka tersebut kurang sebesar 2,83% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 101,75%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 kurang sebesar 5,94%. dari 95,81%

Capaian kinerja tersebut masih ada indikator dalam proses dari KemenPan RB dan BPK.

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari KemenPan RB.

Dalam Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi focus perubahan. Sebagai dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Pelayanan Publik diantaranya yaitu :

- 1) Peningkatan inovasi di Perangkat Daerah yang terinventarisir kedalam aplikasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pada tahun 2021 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Inovatif
 - 2) Mewujudkan terciptanya Zona Integritas di Perangkat Daerah. Pada Tahun 2021 Kita mengirimkan penilaian Zona integritas sebanyak 5 (lima) Perangkat Daerah/Unit Kerja namun belum ada yang mendapatkan, Tahun 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus berhasil mewakili Kabupaten Kudus memperoleh Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari Kemen Pan RB.
Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah maka dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh dengan meliputi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Kematangan Kelembagaan, Realisasi Renja, dan Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut memberikan penilaian sebagai kategori Perangkat Daerah Berkinerja Baik pada Tahun 2020.
 - c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2021 sebesar Masih dalam proses dari BPK.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sampai dengan Tahun 2021 sudah 9 (sembilan) kali dengan hasil WTP.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 104,67% Angka tersebut menurun sebesar 1,20% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 105,87%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 86,88 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 86,81 melampaui sebesar 0,07 dan angka tersebut juga melampaui sebesar 2,46% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 102,21%.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 3 kali dengan hasil rata-rata pencapaian 86,88% dengan katagori Baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
 - Telah dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka partisipasi masyarakat untuk perbaikan layanan publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
 - Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik yang dilaksanakan serentak pada semester I sebanyak 1 kali dan triwulan III serta triwulan IV;
 - Dilaksanakan evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap 4 Perangkat Daerah dengan nilai 71,68 berkategori Zona kuning kategori kepatuhan sedang.
- e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 sebesar 98,83%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 32,23% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 131,06%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 2,53 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 3,08 mengalami penurunan sebesar 0,55 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 9,43% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 89,40%.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Untuk memetakan kondisi implementasi *e-government* secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE.

Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2020 mencapai nilai sebesar 3,08 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,53 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.9
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

Nama Indeks	Nilai		
	2019	2020	2021
SPBE	2,73	3,08	2,53
Domain Kebijakan SPBE	2,53	3,12	2,30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,29	3,43	2,30
Domain Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	1,90
Perencanaan Strategi SPBE	2,14	2,43	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,00	2,50
Penyelenggara SPBE	2,5	3,00	1,00
Domain Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00

Nama Indeks	Nilai		
	2019	2020	2021
Penerapan Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00
Audit TIK	2,33	2,33	1,00
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39	3,49
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33	3,17

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE mengalami penurunan nilai. Jika dibandingkan evaluasi pada tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan hanya 0,55 point, tahun 2021, komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ini ditandai dengan dikeluarkannya Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus.

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE tersebut, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Masih belum optimalnya kinerja tim pengarah SPBE
2. Belum tersusunnya rencana induk SPBE yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE
3. Belum memiliki kebijakan proses bisnis terintegrasi
4. Masih ada beberapa layanan yang belum terdigitalisasi
5. Belum adanya tata kelola untuk integrasi aplikasi sehingga masih banyak aplikasi yang dikembangkan secara parsial

Solusi :

1. Perlunya kejelasan rincian tugas tim pengarah dan perlu diagendakan pertemuan rutin dengan tim pengarah SPBE
2. Perlunya menyusun rencana induk SPBE yang memuat sasaran SPBE, kebijakan dan strategi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE
3. Perlunya memotret kondisi eksisting dan kebutuhan layanan administrasi maupun layanan publik yang ada di Kabupaten Kudus dan menyusun peta jalan pembangunan dan pengembangan aplikasi
4. Perlunya menyusun dokumen integrasi dan tata kelola aplikasi

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 101,75% atau **Sangat tinggi**.

5. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks rasa aman	161,54	0,53	0,55	103,77	0,53	0,44	83,02	0,53	83,02
2.	Indeks Toleransi	100 %	100 %	91,67%	91,67	100	91,67	91,67	100 %	91,67
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	130,77			97,72			87,35		87,35

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2021 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 87,35%. Angka tersebut kurang sebesar 10,37% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 97,72%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 sama sebesar 87,35%.

2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2021 sebesar 83,02%. Angka tersebut kurang sebesar 20,75% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 103,77%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,44 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 0,55 mengalami penurunan sebesar 0,11 dan angka tersebut juga telah sama terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 83,02%.

Tabel 1.11 Perhitungan Indeks Rasa Aman

CAKUPAN PATROLI SIAGA TIBUM TRANMAS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH GANGGUAN TIBUM TRANMAS						JUMLAH	TRIWULAN
		PKL	REKLAME	PGOT	MIRAS	K3	LAIN2		
1	JANUARI	4	130	70	1	0	5	210	417
2	FEBRUARI	2	39	67	0	0	10	118	
3	MARET	5	16	50	5	0	13	89	
4	APRIL	1	25	20	3	6	0	55	161
5	MEI	4	5	13	0	6	6	34	
6	JUNI	7	27	17	5	9	7	72	
7	JULI	23	12	9	5	1	8	58	169
8	AGUSTUS	20	0	19	1	0	13	62	
9	SEPTEMBER	15	12	9	2	3	8	49	
10	OKTOBER	8	3	27	0	14	20	72	197
11	NOVEMBER	20	0	20	0	10	15	65	
12	DESEMBER	11	4	17	6	12	10	60	
JUMLAH		120	282	338	28	61	115	944	944

NO	BULAN	JUMLAH GANGGUAN TIBUM YANG TERTANGANI						JUMLAH	TRIWULAN
		PKL	REKLAME	PGOT	MIRAS	K3	LAIN2		
1	JANUARI	4	130	62	1	0	5	202	397
2	FEBRUARI	2	39	56	5	0	10	112	
3	MARET	5	16	42	7	0	13	82	
4	APRIL	1	25	10	3	6	0	45	112
5	MEI	4	5	8	0	0	6	23	
6	JUNI	4	20	10	0	5	5	44	
7	JULI	23	12	9	5	1	8	58	162
8	AGUSTUS	20	9	19	1	0	13	62	
9	SEPTEMBER	15	12	10	2	3	0	42	
10	OKTOBER	8	3	20	0	14	20	65	178
11	NOVEMBER	20	0	20	0	5	15	60	
12	DESEMBER	11	4	17	6	5	10	53	
JUMLAH		117	275	283	30	39	105	849	849

Keterangan :

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2021 adalah 944

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2021 yang tertangani adalah 849

Jumlah gangguan tibum tranmas tahun 2021 yang tidak tertangani adalah 95

Indeks rasa aman =

Penanganan gangguan tibum tranmas X Luas wilayah gangguan tibum tranmas

Jumlah Penduduk

$$= \frac{1049 \times 364}{866548} = 0,44\%$$

Analisis terkait indeks rasa aman

Faktor yang mendukung tidak tercapainya indeks rasa aman :

- Karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berdampak pada terjadinya PHK.
- Berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat cenderung mengambil jalan pintas pada kegiatan-kegiatan informal yang melanggar.

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
 2. Pemantapan wawasan kebangsaan, idiologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
 3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba (P4GN).
 4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi tahun 2021 sebesar 91,67%. Angka tersebut sama apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 91,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 91,67% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 91,67% sama dan angka tersebut juga turun terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 8,33%.

Pencapaian indeks toleransi tahun 2021 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh :

1. Prosentase potensi konflik agama yang tertangani 75%
2. Prosentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%
3. Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100% Permasalahan yang menjadi faktor kegagalan tercapainya target adalah masih adanya 1 (satu) potensi konflik SARA yang tidak tertangani yaitu penolakan warga setempat terhadap pendirian masjid Baithul Dhohirin LDII di Desa Jepang Rt 05 Rw 02 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\text{Indeks toleransi} = \frac{\% \text{ potensi konflik sosial} + \% \text{ potensi gangguan keamanan} + \% \text{ konflik sara}}{3}$$
$$= \frac{100+100+75}{3} = 91,67\%$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian Indeks Toleransi di Kabupaten Kudus adalah :

1. Peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan/ Organisasi Kemasyarakatan baik yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan/inisiatif dari

masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang peduli terhadap toleransi.

Contoh : FKUB, FPBI, MUI, Dewan Gereja Indonesia dll

2. Tersedianya regulasi yang mengatur toleransi umat beragama salah satunya yang mengatur tentang SOP Pendirian Rumah Ibadah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan penganut kepercayaan.
4. Meningkatnya kehadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA melalui sosialisasi dan mediasi-mediasi penyelesaian permasalahan intoleransi.

Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 87,35% atau **Tinggi**.

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
		Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjayang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	128,03	123,89	96,77	134	126,95	94,74	144,87	87,42
2.	Angka Kemiskinan	99,70	6,45	7,31	86,67	6,21	7,60	81,71	5,90	77,63
3.	Angka Pengangguran	85,49	3,25	5,53	29,84	3,15	3,77	80,32	2,90	70
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,93			71,09			85,51		78,35

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2021 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 85,19%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 14,42% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 71,09%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 7,16% dari 78,35%.

2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2021 sebesar 94,67%. Angka tersebut menurun sebesar 2,26% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 96,77%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 126,65 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 123,89 mengalami

kenaikan sebesar 2,76 dan angka tersebut kurang sebesar 18,22% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 87,42%.

Realisasi sebesar 126,65 juta rupiah adalah dari :

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu Angka PDRB perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 126, 65 Juta rupiah diperoleh dari perhitungan jumlah PDRB Kabupaten Kudus menurut harga berlaku sebesar 108.214,90 juta rupiah dibagi oleh jumlah penduduk sebesar 866.548 jiwa.

Faktor yang mendukung keberhasilan PDRB Per Kapita Pada tahun 2021, jumlah PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar -1,98 persen sesuai dengan harga konstan. Sedangkan jika dihitung dengan harga berlaku PDRB

Kabupaten Kudus mengalami penurunan sekitar -1,2 persen.

Meski demikian tingkat PRDB per Kapita

Kabupaten Kudus mengalami kenaikan sebesar 0,57

persen atau sekitar 7 Juta per penduduk. Faktor

mempengaruhi tingkat PDRB di kabupaten

Kudus disebabkan oleh adanya

perlambatan jumlah penduduk. Selain itu, mulai

bergairahnya dunia perekonomian daerah, memberikan angin bagi

para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet usaha

mereka sehingga diterima oleh pasar dengan Pasar

Kudus.

Program yang mendukung untuk meningkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain :

1. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan
 2. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
 3. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
 4. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 5. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
 6. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2021 sebesar 81,71%. Angka tersebut kurang sebesar 4,96% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 86,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 7.60 apabila dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2020 sebesar 7,31 mengalami kenaikan sebesar 0,29 (angka yang tidak diharapkan) dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 4,08% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 77,63%.

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk Tahun 2021 batas garis kemiskinan adalah sebesar 450.992 rupiah ber jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 kembali meningkat dari kondisi tahun sebesar 7,31 persen menjadi 7,60 persen. Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah SDIT dan lainnya

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkatkan pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social

- c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2021 sebesar 80,32 Angka tersebut telah melampaui sebesar 50,48 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 29,84%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 3,77 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 5,53 melampaui sebesar 1,76 dan angka tersebut juga telah kurang sebesar 10,32% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 70%.

Realisasi sebesar 3,77 adalah dari Perhitungan : TPT =

Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Anggaran KerJa}} \times 100\% \\ &= \frac{19.650}{521.090} \times 100\% \\ &= 3,77 \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi menurunnya angka pengangguran adalah

- Potensi ekonomi sudah mulai membaik setelah pandemi, perekonomian berangsur membaik yang didukung adanya peningkatan permintaan pasar, dunia usaha mulai melakukan usahanya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
- Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
- Adanya kebijakan Pemerintah mempermudah perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus tahun 2021 sebanyak 67.060 jiwa adapun garis kemiskinan tahun 2021 adalah 429.666. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori

10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2021 sebesar 3,77%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 dengan Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan mengembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan ketrampilan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembangunan kawasan transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan *Job Fair*.

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 2,18% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 6,49% Kabupaten Kudus masih tetap lebih baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 86,57% atau **Tinggi**.

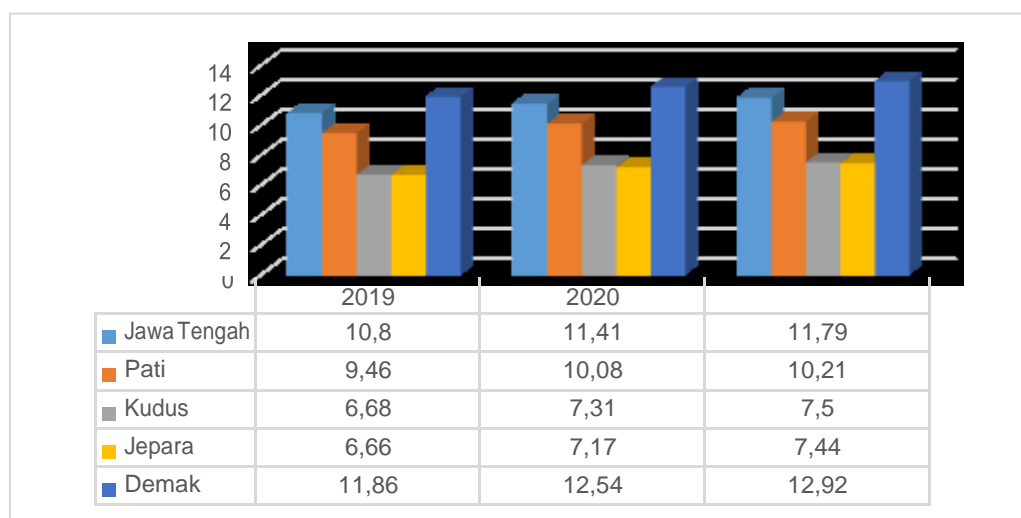
Tabel 1.13
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,60
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429666	450.922
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27

Sumber : SIPD - BPS Tahun 2022 (rilis maret 2022)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 1.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2019-2021



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2021

7. Meningkatnya daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun $n \times 1.05 (n+1)$ dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nilai Investasi		7,74 T	3,26 T	42,12	8,34 T	39,44 T	472,90	9,19 T	429,16
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja				42,12			472,90		429,16

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMPTSP Tahun 2021 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja sasaran tahun 2021
Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 472,90%. Angka tersebut melampaui sebesar 430,78% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 42,12%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 43,74% dari 429,16%.
- 2) Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2021 sebesar 472,90%. Angka tersebut melampaui sebesar 430,78% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 42,12%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 39,44 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 3,26 T mengalami kenaikan sebesar 36,18 T dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 43,74% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 429,16%

Realisasi Tahun 2021 sebesar 39,44 T diperoleh dari Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan NIB terbit Tahun 2021 terdiri dari Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dan Nilai Investasinya. Sektor-sektor tersebut antara lain :

1. Sektor Primer terdiri dari		
- Pertanian	:	130.464.383.628
- Pertambangan	:	--
- Penggalian	:	--
Jumlah SektorPrimer.....		130.464.383.628
2. Sektor Sekunder terdiri dari		
- Listrik, Das dan Air	:	43.921.113.573
- Industri	:	2.981.283.650.844
- Konstruksi	:	19.987.618.181.271
Jumlah Sektor Sekunder.....		23.029.061.981.091
3. Sektor Tersier terdiri dari		
- Perdagangan	:	1.310.088.096.777
- Angkutan dan Komunikasi	:	2.607.794.788.751
- Keuangan dan Jasa	:	12.357.611.534.367
Jumlah Sektor Tersier.....		16.275.494.419.895
Total Keseluruhan.....		39.435.020.784.614

Indikator Realisasi Investasi dengan formulasi adalah Penjumlahan Nilai Realisasi Investasi terlaporkan dan Realisasi Investasi yang belum terlaporkan untuk tahun 2021 dengan target 8,34 Trilyun dan realisasi kinerja sebesar 39,44 Trilyun dengan upaya-upaya yang ditempuh melalui :

- a. Sosialisasi OSS versi RBA kepada para pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial dan tatap muka.
- b. Melakukan Promosi Penanaman Modal melalui Media Cetak dan media cetak (Surat Kabar).
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha dalam memberikan pemahaman dan tanggung jawabnya dengan melakukan pelaporan LKPM

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2021 yaitu :

- a. Program Promosi Penanaman Modal
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 472,90% atau **Sangat Tinggi**

8. Meningkatkan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase. Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	80,72%	83,19%	103,06	81,72	83,60	102,30	83,73%	99,84
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,26			103,06			102,30		99,84

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 102,30%. Angka tersebut turun sebesar 0,76% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 103,06%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 2,46% dari 99,84%.

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2021 sebesar 102,30%. Angka tersebut turun sebesar 0,76% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,26%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 83,60 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 83,19 melampaui sebesar 0.41 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 2,46% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 99,84%

Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2021 di Kabupaten Kudus tercapai sebesar 83,60% dipengaruhi oleh :

- Prosentase Jalan dalam kondisi mantap	92,34%
- Prosentase Jembatan dalam kondisi mantap dan Sedang	90,17%
- Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik	87,90%
- Prosentase Panjang saluran Drainase perkotaan dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	<u>64,00%</u>
Jumlah	334,41%

Realisasi Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap adalah: $334,41\% : 4 = 83,60\%$

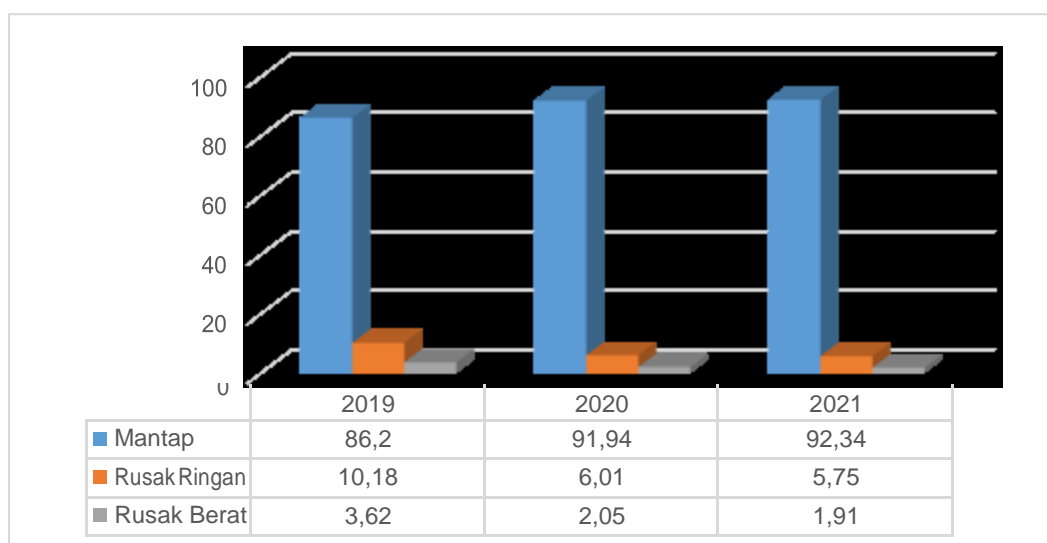
Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 1.16
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2021

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Mantap	86,20	91,94	92,34
2	Rusak ringan	10,18	6,01	5,75
3	Rusak berat	3,62	2,05	1,91

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Grafik 1.7.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7,20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jembatan Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 1.17
Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

NO.	KONDISI JEMBATAN	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Baik	unit	208	312	312
		%	58,43	87,64	87,64
2.	Sedang	unit	106	9	9
		%	29,78	2,53	2,53
3.	Rusak	unit	42	35	35
		%	11,80	9,83	9,83
JUMLAH		unit	356	356	356

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.18
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2021

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020	2021
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40	9.049,40
		%	86,28	87,64	87,90
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00	513,00
		%	7,76	7,76	4,98

NO	KONDISI DAERAH IRIGASI	SATUAN	2019	2020	2021
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00	733,00
		%	4,98	4,98	7,12
4	Rusak Berat	Ha	100,50	-	-
		%	0,98	-	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.295	10.295
		%	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Saluran drainase tahun 2018 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2018 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang

108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2021 Panjang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 591.446,25 meter dengan kondisi baik 43,81 % (259.171,25 m), Kondisi sedang 20,20% (119.493,00 m) sedangkan kondisi rusak 36,00% (212.959,00 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2020 adalah sebesar 63,03 % sedangkan Tahun 2021 adalah sebesar 64,00 % persentase ada peningkatan.

Tabel 1.19
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03	64,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah :

1. Upaya penanganan Kondisi Infrastruktur rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Kudus
2. Penyusunan perencanaan rehabilitasi infrastruktur untuk tahun yang akan datang sesuai dengan skala prioritas.
3. Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang berdampak pada beban dan kapasitas yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratruktur :

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kotadan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2021 adalah sebesar 98,00 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi

Tabel 1.20
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03	98,00
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten cakupan pelayanan penataan ruang tahun 2021 (dua) 2 dokumen yaitu Penyelesaian Ranperda

Revisi RTRW Kabupaten Kudus dan Penyusunan RDTRK Kecamatan Mejobo. Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.21
Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas tanah bersertikat di tahun 2020 yaitu 74,80 % sedangkan target di tahun 2021 persentase luas tanah bersertikat 71,00 % capaian 80,00 % target terlampaui sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.22
Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70	42.516,00
2	Luas tanah Bersertipikat HGB	ha	776,22	740,5199	714,00
3	Persentase luas tanah Bersertipikat HGB	ha	1,83	1,74	2,00
4	Luas tanah Bersertipikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167	5.417,00
5	Persentase luas tanah Bersertipikat HP	ha	5,40	8,48	13,00
6	Luas tanah Bersertipikat HM	ha	28.662,38	27.401,2264	27.812,00
7	Persentase luas tanah Bersertipikat HM	ha	67,42	64,45	65,00
8	Luas tanah Bersertipikat HW	ha	41,82	62,0062	84,00
9	Persentase luas tanah Bersertipikat HW	ha	0,10	0,15	0,2
10	Total Luas tanah Bersertipikat	ha	31.777,29	31.810,6697	34.027
11	Persentase luas tanah Bersertipikat	ha	74,74	74,80	80,00

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Program Penataan Bangunan Gedung.
6. Program Penyelenggaraan Jalan.
7. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
9. Program Penatagunaan Tanah.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.
3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

Strategi untuk peningkatan insfrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahanan aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Solusi :

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,30% atau **Sangat tinggi**

9. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 1.23
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun							Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020		2021					
		% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	64,13	64,67	100,84	65,34	62,76	96,05	67,77	92,61
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,22			100,84			96,05		92,61

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 96,05%. Angka tersebut kurang sebesar 4,79% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2020 sebesar 100,84%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui sebesar 3,45% dari target sebesar 92,61%.

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 sebesar 96,05%. Angka tersebut kurang sebesar 4,79% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 100,84%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 62,76 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 64,67 mengalami penurunan sebesar 1,91 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 0,98% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,61%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2021 dipengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 47,00 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 79,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 58,90 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	47,00	37,60%	17,67%
2.	Indeks Kualitas Udara	79,47	40,50%	32,19%
3.	Indeks Tutupan Lahan	58,90	21,90%	12,90%

Dengan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Bobot x IKA}) + (\text{Bobot x IKU}) + (\text{Bobot x ITL}) = \text{Realisasi } (37,60\% \times 47,00) + (40,50\% \times 79,47) + (21,90\% \times 58,90) = 62,76$$

Faktor yang menyebabkan kegagalan tidak tercapainya kinerja IKLH Kabupaten Kudus Tahun 2021

1. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan target IKA yaitu adanya pandemic Covid 19 dimana Kabupaten Kudus mengalami dampak besar pada awal dan pertengahan Tahun 2021, sehingga mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Perilaku pemenuhan protokol kesehatan berupa mencuci tangan pakai sabun mempengaruhi kualitas air permukaan di Kabupaten Kudus, sehingga menurunkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021.
2. Faktor yang menjadi penghambat indeks kualitas udara adalah dengan adanya pandemi covid-19 mempengaruhi perilaku menjaga jarak dengan orang lain, berpengaruh terhadap pilihan moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas masyarakat. Masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi selama masa pandemic untuk menghindari berdekatan dengan orang lain dalam satu moda transportasi individu menyebabkan penurunan kualitas udara sehingga berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021.

Program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IKLH :

1. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi penurunan kualitas air yaitu melaksanakan pengawasan secara rutin kepada pemilik persetujuan lingkungan dan segera menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan.
2. Upaya dilaksanakan untuk mengurangi penurunan kualitas udara yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemilik persetujuan lingkungan.
3. Upaya untuk peningkatan Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan melaksanakan penanaman pohon dilahan Tahura untuk konservasi lahan kritis.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan

Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 sebesar 96,06% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana table berikut :

Tabel 1.24
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021			Realisasi Tahun 2020	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian			
1	Indeks Kualitas Air	48,42	47,00	97,07%	47,22	50,85	92,43%
2	Indeks Kualitas Udara	91,49	79,47	86,86%	90,34	93,92	84,61%
3	Indeks Tutupan Lahan	58,42	58,23	99,67%	58,51	60,85	95,69%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Indeks kualitas air

Angka capaian Indeks Kualitas Air tahun 2021 sebesar 97,07%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 47,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 47,22 mengalami penurunan sebesar 0,22 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 4,64% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,43%. Indeks kualitas udara

Angka capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2021 sebesar 86,86%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 79,47 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 90,34 mengalami penurunan sebesar 10,87 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 2,25% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 84,61%. Indeks tutupan lahan

Angka capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 sebesar 99,67%. Realisasi Tahun 2021 sebesar 58,23 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 58,51 mengalami penurunan sebesar 0,28 dan angka tersebut juga telah melampaui sebesar 3,98% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,69%. Luas tutupan lahan pada Tahun 2021 sebesar 166,84 Km²

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO₂ dan angka 20 untuk SO₂.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO₂ dan SO₂.

Efektifitas dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 96,06% atau kategori **Sangat tinggi.**

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Adapun Alokasi anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 1.25
Alokasi Anggaran Program Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Harapan Lama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan	160.151.529.556	118.799.752.205	74,18%
		• Rata-rata lama sekolah	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	4.666.088.500	4.356.532.954	93,37%
		• Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Pengembangan kapasitas kepramukaan	180.000.000	180.000.000	100%
			Pembinaan perpustakaan	59.567.000	28.098.500	47,17%
			Pengelolaan arsip	222.074.000	197.784.511	89,06%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Angka Harapan Hidup	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	261.544.251.818	181.282.327.195	69,31%
		• Angka Kematian Ibu	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.885.314.907	718.825.138	24,91%
		• Angka Kematian Bayi	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	428.750.000	127.638.200	29,77%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	997.026.000	414.549.500	41,58%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	251.209.293.103	213.885.369.640	85,14%
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	12.529.927.000	9.769.286.090	77,97%
			Penangan bencana	60.000.000	59.940.000	99,90%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.033.000	77.523.590	90,11%
			Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	122.810.000	90.097.200	73,36%
			Perlindungan perempuan	15.000.000	10.589.000	70,59%
			Pengelolaan system data gender dan anak	7.992.000	6.322.000	79,10%
			Pemenuhan hak anak	69.464.000	47.100.000	67,80%
			Perlindungan khusus anak	22.880.000	16.919.000	73,95%
			Pengendalian penduduk	53.550.000	33.013.000	61,65%
			Pembinaan keluarga berencana	4.867.201.000	3.576.072.536	73,47%
			Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	52.414.000	35.694.250	68,10%
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.172.500.000	930.164.400	79,33%
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	515.000.000	506.803.000	98,41%
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	398.294.000	330.709.700	83,03%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Penanganan kerawanan pangan	86.040.000	25.551.300	29,70%
			Pengawasan Keamanan Pangan	126.440.000	108.199.400	85,57%
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	150.066.400	143.717.800	95,77%
			Pemberdayaan sosial	190.000.000	189.701.450	99,84%
			Rehabilitasi sosial	2.457.290.000	2.416.221.500	98,33%
			Perlindungan jaminan sosial	208.880.000	206.482.902	98,85%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Reformasi Birokrasi • Nilai Akutabilitas Kinerja • Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Indek Kepuasan Masyarakat 	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Pendaftaran penduduk	1.429.895.000	1.289.133.878	90,16%
			Pelayanan pencatatan sipil	569.593.000	503.932.086	88,47%
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	201.640.000	186.704.392	92,59%
			Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	11.914.900	3.580.000	30,05%
			Pengembangan Kebudayaan	24.271.000	4.130.000	17,02%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Penyenggaraan pemerintahan dan pelayan public	28.674.000	26.521.400	92,49%
			Pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan	298.622.000	242.729.700	81,28%
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	171.965.400	164.046.800	95,40%
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	447.213.200	402.889.500	90,09%
			Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	281.572.900	221.641.799	78,72%
			Penataan desa	1.587.908.000	1.321.574.150	83,22%
			Peningkatan kerjasama desa	150.000.000	135.103.000	90,06%
			Administrasi pemerintahan desa	3.192.027.000	2.165.353.794	67,83%
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	799.840.800	381.449.100	47,69%
			Kepegawaian Daerah	3.805.120	1.758.288	46,21%
			Pengembangan sumber daya manusia	3.756.481	1.991.416	53,01%
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.190.468.000	991.250.662	86,71%
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	203.585.000	198.213.646	97,56%
			Penelitian dan pengembangan daerah	218.112.000	215.621.483	98,80%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pengelolaan keuangan daerah	286.504.433.135	278.113.241.828	97,07%
			Pengelolaan barang milik daerah	1.233.222.300	1.083.655.340	87,87%
			Pengelolaan pendapatan daerah	1.760.096.000	1.649.400.862	93,71%
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	47.523.458.000	37.459.168.000	78,82%
			Penyelenggaraan pengawasan	757.040.000	247.563.972	34,93%
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	864.768.000	535.944.279	64,84%
			Informasi dan komunikasi publik	9.001.225.800	8.776.177.313	97,50%
			Aplikasi informaiika	10.787.837.700	3.106.038.727	28,79%
			Penyelenggaraan statistik sektoral	124.159.000	72.097.000	58,07%
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	243.300.000	218.895.065	89,97%
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	2.372.438.000	2.173.123.047	96,00%
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	901.185.000	824.596.564	98,01%
		• Indeks Toleransi	Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	558.629.900	234.353.300	41,95%
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	1.278.915.000	1.249.164.850	97,67%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	28.347.000	20.728.400	73,12%
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	201.930.400	156.894.000	77,70%
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	286.476.000	218.569.000	76,30%
			Pengembangan kebudayaan	598.502.500	464.626.000	77,63%
			Pengembangan kesenian tradisional	79.800.000	10.410.000	13,05%
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	366.000.000	245.020.500	66,95%
			Pengelolaan permuseuman	1.635.999.948	1.601.979.731	97,92%
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Perkapita (Juta Rupiah) • Angka Kemiskinan • Angka Pengangguran 	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	154.059.000	58.301.500	37,84%
			Pengediaan dan pengembangan sarana pertanian	27.042.000	25.425.000	94,02%
			Pengediaan dan pengembangan prasarana pertanian	4.457.431.000	4.166.260.850	93,47%
			Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	422.152.000	341.952.300	81,00%
			Pengendalian dan enanggulangan Bencana Pertanian	1.157.730.000	900.992.300	77,82%
			Penyuluhan pertanian	6.694.872.000	1.871.840.500	27,96%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.190.179.316	1.025.476.027	86,16%
			Pemasaran pariwisata	254.000.000	212.794.000	83,78%
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	273.688.000	-	0%
			Pemenuhan upaya kesehatan peroranga dan upaya kesehatan Masyarakat	254.740.000	202.841.500	79,63%
			Peningkatan sarana distribusi perdagangan	3.130.906.500	1.134.172.400	36,23%
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang Penting	22.482.000	19.322.000	85,94%
			Pengembangan ekspor	40.668.000	0,00	0%
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	32.600.000	26.610.700	81,63%
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	74.124.000	58.716.900	79,21%
			Penanggulangan bencana	1.037.454.664	874.443.298	84,29%
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	525.000.000	396.963.200	75,61%
			Perencanaan tenaga kerja	29.999.900	26.787.700	89,29%
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	5.178.819.160	3.523.177.501	68,03%
			Penempatan tenaga kerja	74.000.000	52.121.400	70,43%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Hubungan industrial	136.453.900	121.912.900	89,34%
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	440.340.000	414.545.600	94,15%
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	3.268.917.000	451.526.931	13,81%
			Perencanaan dan pembangunan Industri	47.829.833.500	877.588.470	1,,84%
			Pembangunan kawasan transmigrasi	5.000.000	3.320.000	66,40%
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	29.184.000	17.361.200	59,49%
			Promosi penanaman modal	248.248.450	239.722.750	96,57%
			Pelayanan penanaman modal	9.367.607.743	8.282.213.083	88,41%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	436.896.000	317.827.200	72,75%
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	78.756.000	68.587.650	87,29%
			Pengelolaan energi baru terbarukan	1.350.000	-	0%
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air	7.328.651.000	4.862.528.111	66,35%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	5.485.462.000	5.012.017.500	91,37%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.139.832.000	1.129.779.400	99,12%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	2.600.968.000	2.214.555.640	85,14%
			Penataan bangunan gedung	6.254.970.881	5.509.920.470	88,09%
			Penyelenggaraan jalan	21.616.001.000	17.758.949.412	82,16%
			Penyelenggaraan penataan ruang	724.208.000	613.717.778	84,74%
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	8.816.592.100	72.233.180	0,82%
			Penatagunaan tanah	660.000.000	309.595.910	46,91%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	90.720.000	39.105.000	43,11%
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	2.297.905.939	2.169.667.700	94,42%
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	270.490.000	140.582.210	51,97%
			Pengembangan perumahan	980.775.728	879.249.258	89,65%
			Kawasan permukiman	2.558.720.000	2.295.645.500	89,72%
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	34.029.538.000	33.605.952.778	98,76%
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	76.783.720	68.253.427	88,89%
			Pengelolaan keanekaragaman hayati	1.935.780.000	1.734.314.642	89,59%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	7.000.000	6.359.000	90,84%
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat	7.800.000	1.542.500	19,78%
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	13.200.000	7.725.000	58,52%
			Penanganan pengaduan lingkungan hidup	1.000.000	248.000	24,80%
			Pengelolaan persampahan	6.002.756.000	5.293.727.889	88,19%
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	5.000.000	4.998.000	99,96%
			JUMLAH	1.273.236.992.269	994.933.731.998	78,14%

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 1.273.236.992.269,- untuk 126 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 994.933.731.998,-

EFISIENSI ANGGARAN

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.26
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Harapan Lama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan	73,96	80,00	108,17%	160.151529.556	118.799.752.205	74,18%	31,42%
		• Rata-rata lama sekolah	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	92,00	92,00	100,00%	4.666.088.500	4.356.532.954	93,37%	6,63%
		• Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Pengembangan kapasitas kepramukaan	95,95	100,00	104,22%	180.000.000	180.000.000	100%	4,05%
			Pembinaan perpustakaan	8,00	1,14	14,25%	59.567.000	28.098.500	47,17%	-231,03%
			Pengelolaan arsip	16,67	25,58	153,45%	222.074.000	197.784.511	89,06%	41,96%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Angka Harapan Hidup	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00	78,86	78,86%	261.544.251.818	181.282.327.195	69,31%	17,63%
		• Angka Kematian Ibu	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	91,30	92,65	101,48%	2.885.314.907	718.825.138	24,91%	75,45%
		• Angka Kematian Bayi	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan Minuman	91,30	92,65	101,48%	428.750.000	127.638.200	29,77%	70,66%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00	93,30	93,30	997.026.000	414.549.500	41,58%	55,44%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00	97,25	97,25%	251.209.293.103	213.885.369.640	85,14%	12,45%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	16 bulan	15 bulan	93,75%	12.529.927.000	9.769.286.090	77,97%	16,83%
			Penangan bencana	100,00	100,00	100,00%	60.000.000	59.940.000	99,90%	0,10%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00	100,00	100,00%	86.033.000	77.523.590	90,11%	9,89%
			Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	60,61	82,62	136,31%	122.810.000	90.097.200	73,36%	46,18%
			Perlindungan perempuan	0,0017	2,84	16.705%	15.000.000	10.589.000	70,59%	99,58%
			Pengelolaan system data gender da anak	65,60	63,98	95,53%	7.992.000	6.322.000	79,10%	18,89%
			Pemenuhan hak anak	2,00	1,00	50,00%	69.464.000	47.100.000	67,80%	-35,61%
			Perlindungan khusus anak	100,00	100,00	100,00%	22.880.000	16.919.000	73,95%	26,05%
			Pengendalian penduduk	2,02	2,02	100,00%	53.550.000	33.013.000	61,65%	41,26%
			Pembinaan keluarga Berencana	14,00	15,40	110,00%	4.867.201.000	3.576.072.536	73,47%	33,21%
			Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera	70,00	72,52	103,60%	52.414.000	35.694.250	68,10%	34,27%
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	95,95	100,00	104,22%	1.172.500.000	930.164.400	79,33%	23,88%
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00	161,24	161,24%	515.000.000	506.803.000	98,41%	38,97%
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100,00	161,24	161,24%	398.294.000	330.709.700	83,03%	48,50%
			Penanganan kerawanan pangan	90,00	100,00	111,11%	86.040.000	25.551.300	29,70%	73,27%
			Pengawasan Keamanan Pangan	88,00	93,00	105,68%	126.440.000	108.199.400	85,57%	19,03%
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	98,00	98,01	100,01%	150.066.400	143.717.800	95,77%	4,24%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pemberdayaan sosial	65,00	83,33	128,20%	190.000.000	189.701.450	99,84%	22,12%
			Rehabilitasi sosial	5,60	86,60	1.546,43%	2.457.290.000	2.416.221.500	98,33%	93,64%
			Perlindungan jaminan sosial	42,00	79,75	189,88%	208.880.000	206.482.902	98,85%	47,94%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	• Indeks Reformasi Birokrasi	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79	Masih dalam proses					
		• Nilai Akutabilitas Kinerja		75,00	Masih dalam proses					
		• Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)		WTP	Masih dalam proses					
		• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pendaftaran penduduk	100	98,54	98,54	1.429.895.000	1.289.133.878	90,16%	9,01%
			Pelayanan pencatatan sipil	100	98,14	98,14	569.593.000	503.932.086	88,47%	9,85%
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100	100	100	201.640.000	186.704.392	92,59%	7,41%
		• Indek Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	66,67	61,78	92,67	11.914.900	3.580.000	30,05%	33,33%
			Pengembangan Kebudayaan	100,00	32,9	32,90	24.271.000	4.130.000	17,02%	-0,05%
			Penyenggaraan pemerintahan dan pelayan publik	100,00	99,91	99,91	28.674.000	26.521.400	92,49%	1,48%
			Pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan Kelurahan	100,00	89,69	89,69	298.622.000	242.729.700	81,28%	1,91%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	80,56	77,80	96,57	171.965.400	164.046.800	95,40%	-13,58%
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	91,67	91,05	99,33	447.213.200	402.889.500	90,09%	9,51%
			Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89,33	86,85	97,22	281.572.900	221.641.799	78,72%	19,31%
			Penataan desa	3	3	100,00%	1.587.908.000	1.321.574.150	83,22%	16,77%
			Peningkatan kerjasama desa	1	2	200,00%	150.000.000	135.103.000	90,06%	54,97%
			Administrasi pemerintahan Desa	14	14	100,00%	3.192.027.000	2.165.353.794	67,83%	32,16%
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	7	7	100,00%	799.840.800	381.449.100	47,69%	52,21%
			Kepegawaian Daerah	82,40	76,64	93,01%	3.805.120	1.758.288	46,21%	50,32%
			Pengembangan sumber daya Manusia	1,6	5,89	358,13%	3.756.481	1.991.416	53,01%	85,60%
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	77,5	79,22	102,22%	1.190.468.000	991.250.662	86,71%	18,54%
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	100	100	100,00%	203.585.000	198.213.646	97,56%	2,54%
			Penelitian dan pengembangan Daerah	86	86	100,00%	218.112.000	215.621.483	98,80%	1,14%
			Pengelolaan keuangan daerah	98,33	94,18	95,78%	286.504.433.135	278.113.241.828	97,07%	-1,36%
			Pengelolaan barang milik Daerah	90,00	99,79	110,88%	1.233.222.300	1.083.655.340	87,87%	20,75%
			Pengelolaan pendapatan Daerah	100,00	138,07	138,07%	1.760.096.000	1.649.400.862	93,71%	32,13%
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00	92,85	92,85	47.523.458.000	37.459.168.000	78,82%	15,11%
			Penyelenggaraan pengawasan	100,00	100,00	100,00	757.040.000	247.563.972	34,93%	60,50%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	67,32	58,00	86,16	864.768.000	535.944.279	64,84%	24,53%
			Informasi dan komunikasi Publik	100,00	100,00	100,00	9.001.225.800	8.776.177.313	97,50%	2,50%
			Aplikasi informaiika	2,29	2,29	100,00	10.787.837.700	3.106.038.727	28,79%	71,21%
			Penyelenggaraan statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	124.159.000	72.097.000	58,07%	41,93%
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	15,00	12,00	80,00	243.300.000	218.895.065	89,97%	-12,46%
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	• Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	75,00	95,00	126,67%	2.372.438.000	2.173.123.047	96,00%	29,16%
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	84,00	84,00	100,00%	901.185.000	824.596.564	98,01%	8,50%
		• Indeks Toleransi	Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00	100,00	100,00%	558.629.900	234.353.300	41,95%	58,05%
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	100,00	100,00	100,00%	1.278.915.000	1.249.164.850	97,67%	2,33%
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00	75,00	75,00%	28.347.000	20.728.400	73,12%	2,50%
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00	75,00	75,00%	201.930.400	156.894.000	77,70%	-3,50%
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100,00	100,00	100,00%	286.476.000	218.569.000	76,30%	23,70%
			Pengembangan kebudayaan	59,00	53,00	89,83%	598.502.500	464.626.000	77,63%	13,58%
			Pengembangan kesenian tradisional	59,00	53,00	89,83%	79.800.000	10.410.000	13,05%	85,48%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	18,00	37,00	205,56%	366.000.000	245.020.500	66,95%	67,43%
			Pengelolaan permuseuman	18,00	37,00	205,56%	1.635.999.948	1.601.979.731	97,92%	67,43%
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Perkapita (Juta Rupiah) • Angka Kemiskinan • Angka Pengangguran 	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	98,00	98,01	100,01%	154.059.000	58.301.500	37,84%	62,16%
			Pengediaan dan pengembangan sarana pertanian	97,03	102,40	105,53%	27.042.000	25.425.000	94,02%	10,91%
			Pengediaan dan pengembangan prasarana pertanian	97,03	102,40	105,53%	4.457.431.000	4.166.260.850	93,47%	11,43%
			Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	90,70	88,53	97,61%	422.152.000	341.952.300	81,00%	17,01%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	97,03	102,40	105,53%	1.157.730.000	900.992.300	77,82%	26,26%
			Penyuluhan pertanian	97,03	102,40	105,53%	6.694.872.000	1.871.840.500	27,96%	73,51%
			Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6,00	6,00		1.190.179.316	1.025.476.027	86,16%	13,84%
			Pemasaran pariwisata	13,00	31.467	242.053,85	254.000.000	212.794.000	83,78%	99,97%
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0,00	0,00	0,00	273.688.000	-	0%	0,00%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	0,00	0,00	0,00	254.740.000	202.841.500	79,63%	0,00%
			Peningkatan sarana distribusi perdagangan	44,45	42,04	94,58%	3.130.906.500	1.134.172.400	36,23%	61,69%
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90,00	41,25	45,83%	22.482.000	19.322.000	85,94%	-87,51%
			Pengembangan ekspor	11950000000	1.424.769.365.989,13	119,23^	40.668.000	0,00	0%	100,00%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Standarisasi dan perlindungan Konsumen	85,00	72,88	85,74%	32.600.000	26.610.700	81,63%	4,80%
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50,00	52,94	105,88%	74.124.000	58.716.900	79,21%	25,19%
			Penanggulangan bencana	100,00	100,00	100,00%	1.037.454.664	874.443.298	84,29%	17,68%
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	525.000.000	396.963.200	75,61%	0,00%
			Perencanaan tenaga kerja	46,00	39,00	84,78%	29.999.900	26.787.700	89,29%	-5,32%
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	46,00	39,00	84,78%	5.178.819.160	3.523.177.501	68,03%	19,58%
			Penempatan tenaga kerja	46,00	39,00	84,78%	74.000.000	52.121.400	70,43%	16,92%
			Hubungan industrial	100	100,00	100,00%	136.453.900	121.912.900	89,34%	3,80%
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	88,50	86,33	97,55%	440.340.000	414.545.600	94,15%	2,41%
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	5,25	4,85	92,38%	3.268.917.000	451.526.931	13,81%	84,83%
			Perencanaan dan pembangunan industri	0,30	0,15	50,00%	47.829.833.500	877.588.470	1,84%	94,71%
			Pembangunan kawasan transmigrasi	25,00	0,00	0,00%	5.000.000	3.320.000	66,40%	0,00%
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	100,00	100,00	100,00%	29.184.000	17.361.200	59,49%	40,51%
			Promosi penanaman modal	6,00	-27,78	0,00%	248.248.450	239.722.750	96,57%	0,00%
			Pelayanan penanaman modal	79,00	85	107,59%	9.367.607.743	8.282.213.083	88,41%	17,839%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	3,171 T	0,73	23,02%	436.896.000	317.827.200	72,75%	-216,00%
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	84,00	70,65	84,09%	78.756.000	68.587.650	87,29%	-3,55%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan energi baru Terbarukan	100,00	20,00	20,00%	1.350.000	-	0%	100%
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air	83,00	87,90	102,30%	7.328.651.000	4.862.528.111	66,35%	37,35%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	98,00	98,00	100,00%	5.485.462.000	5.012.017.500	91,37%	8,63%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	99,00	100,00	101,01%	1.139.832.000	1.129.779.400	99,12%	1,87%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	64,00	64,00	100,00%	2.600.968.000	2.214.555.640	85,14%	14,86%
			Penataan bangunan gedung	50,00	50,00	100,00%	6.254.970.881	5.509.920.470	88,09%	11,91%
			Penyelenggaraan jalan	88,62	92,50	104,38%	21.616.001.000	17.758.949.412	82,16%	21,29%
			Penyelenggaraan penataan Ruang	100,00	100,00	100,00%	724.208.000	613.717.778	84,74%	15,26%
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1,00	1,00	100,00%	8.816.592.100	72.233.180	0,82%	99,18%
			Penatagunaan tanah	100,00	100,00	100,00%	660.000.000	309.595.910	46,91%	53,09%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	90.720.000	39.105.000	43,11%	56,89%
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	270.490.000	140.582.210	51,97%	0,00%
			Pengembangan perumahan	98,11	97,07	98,94%	980.775.728	879.249.258	89,65%	9,39%
			Kawasan permukiman	0,05	0,02	40,00%	2.558.720.000	2.295.645.500	89,72%	-124,30%
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	98,11	96,88	98,75%	34.029.538.000	33.605.952.778	98,76%	-0,01%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	65,34	62,60	95,81%	76.783.720	68.253.427	88,89%	7,22%
			Pengelolaan keanekaragaman hayati	8,17	8,16	99,88%	1.935.780.000	1.734.314.642	89,59%	10,30%
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	34,00	47,06	138,41%	7.000.000	6.359.000	90,84%	34,37%
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	5,00	17,00	340,00%	7.800.000	1.542.500	19,78%	94,18%
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	5,00	17,00	340,00%	13.200.000	7.725.000	58,52%	82,79%
			Penanganan pengaduan lingkungan hidup	34,00	34,80	102,35%	1.000.000	248.000	24,80%	75,77%
			Pengelolaan persampahan	74,00	77,00	104,05%	6.002.756.000	5.293.727.889	88,19%	15,25%
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	0,32	9,95	3.109,38 %	5.000.000	4.998.000	99,96%	96,79%
			JUMLAH			99,01%	1.273.236.992.269	994.933.731.998	78,14%	23,26%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2021 Capaian Kinerja 99,01%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 78,14%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 23,26%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

1. Opini WTP ini merupakan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Kudus HM. Hartopo di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang (Jumat, 21/05/2021).



- 2 Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hal tersebut didapati ketika Bupati Kudus Hartopo menghadiri secara virtual Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Command Center Dinas Kominfo, Kamis, (29/7/2021).



3. Penghargaan WTP 9 (Sembilan) kali dari Menteri Keuangan dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi para Asisten Sekda, Kepala BPPKAD, dan Inspektur Kabupaten Kudus mengikuti yang digelar secara virtual melalui video teleconference di gedung Command Center Diskominfo, Selasa (14/9/2021).



4. Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kategori Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kategori level Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara Virtual. Turut menyaksikan pemberian penghargaan tersebut, Bupati Kudus didampingi Ketua TP PKK Kudus Hj. Mawar Hartopo yang sekaligus menerima penghargaan APE level Madya mewakili Kabupaten Kudus, di gedung Command Center Diskominfo Kudus, Rabu (13/10/2021)



5. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi aspek penting penunjang kesejahteraan masyarakat, Hal tersebut membuat RSUD milik Pemkab Kudus mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit berplat merah, RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus mendapatkan penghargaan rumah sakit tipe B paling berkomitmen dengan BPJS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Kudus kepada Dirut RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan disaksikan oleh Bupati Kudus H.M. Hartopo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Jumat (15/10/2021).



- 6 Penghargaan dalam acara Indonesia Awards 2021. Bupati menerima penghargaan kategori Public Health Care, yakni 'Encouraging Public Participation to Accelerate Pandemic Recovery' di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2021)



7. Penghargaan 'Kepala Daerah yang Berhasil Pertahankan Industri Rokok Kecil Melalui KIHT'. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Radar Kudus Kudus Baehaqi di Command Center Diskominfo, Senin (13/12/2021).



- f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
1. Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.
 2. Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
 - c. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
 - d. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan
 4. Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :
 - a. Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
 - b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.

- c. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.
5. Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :
- a Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
 - b Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
 - c Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
 - d Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.
6. Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.

7. Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini adalah, sebagai berikut :
 - a. Program peningkatan ketahanan pangan
 - b. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
 - d. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial
8. Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan Indeks Toleransi adalah :
 - a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
 - f. 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
9. Program yang mendukung untuk meingkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain :
 - a. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan
 - b. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
 - c. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
 - d. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 - e. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
 - f. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
10. Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :
 - a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- b. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
 - c. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social
11. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.
 12. Program dan kegiatan dalam Pencapaian Nilai Investasi yaitu :
 - a. Program Promosi Penanaman Modal
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 13. Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratraktur :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - b. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

- c. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kotadan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

14. Program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IKLH :

- a. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi penurunan kualitas air yaitu melaksanakan pengawasan secara rutin kepada pemilik persetujuan lingkungan dan segera menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan.
- b. Upaya dilaksanakan untuk mengurangi penurunan kualitas udara yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemilik persetujuan lingkungan.
- c. Upaya untuk peningkatan Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan melaksanakan penanaman pohon di lahan Tahura untuk konservasi lahan kritis.